



PUTUSAN

Nomor : 23/Pid. B/2011/PN. UNH.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

_____ Pengadilan Negeri Unaaha yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa: _____

Nama lengkap : **Ir. YUSUF SUPRIATNA,WM.**
Tempat lahir : Bandung.
Umur/tanggal lahir : 57 tahun / 19 Juli 1953.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan/
Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat tinggal : BTN Graha Asri Blok D/12 Puuwatu Kota Kendari.
Agama : Islam.
Pekerjaan : PNS.
Pendidikan : Sarjana.

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh : _

1. Penyidikan tidak dilakukan penahanan; _____
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 05 Januari 2011 s/d 24 Januari 2011; _____
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Unaaha, sejak tanggal 25 Januari 2011 s/d 23 Februari 2011; _____
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha, sejak tanggal 08 Februari 2011 s/d tanggal 09 Maret 2011; _____
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Unaaha sejak tanggal 10 Maret 2011 s/d tanggal 08 Mei 2011; _____
6. Perpanjangan I Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara, sejak tanggal 09 Mei 2011 s/d 07 Juni 2011; _____
7. Perpanjangan II Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara, sejak tanggal 08 Juni 2011 s/d 07 Juli 2011; _____

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Terdakwa dibantar sejak tanggal 25 Mei 2011 s/d tanggal 29 Juni 2011; _____

Terdakwa selama dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum bernama RISAL AKMAN, SH. Advokat/Pengacara, yang beralamat Kantor di Jl. S. Parman No. 241 Unaaha Kabupaten Konawe, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.: 06/SK.PID/RSA/II/ 2011, tertanggal 24 Februari 2011 yang telah didaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Unaaha dengan register Nomor: W23-U5/278/HN.01.10/II/2011, tanggal 24 Februari 2011; _____

_____ **PENGADILAN NEGERI** tersebut; _____

• Telah membaca : _____

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Unaaha Nomor: 23/Pen.Pid/2011/PN.Unaha, tanggal 08 Februari 2011 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara Ir. Yusuf Supriatna, WM, Reg.Pid No. 23/Pid.B/2011/PN. Unh.; _____

2. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha No. 23/ Pen.Pid/2011/PN.Unaha tanggal 08 Februari 2011 tentang Penetapan hari sidang I perkara ini. _____

3. Berkas perkara atas nama terdakwa beserta seluruh lampirannya; _____

• Telah mendengar keterangan saksi-saksi, ahli dan keterangan terdakwa; _____

• Telah memeriksa, meneliti barang bukti yang diajukan dipersidangan; _____

• Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan : _____

1. Meyatakan Terdakwa Ir. Yusuf Supriatna WM, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yakni “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara” sebagaimana dimaksud di Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana dakwaan subsidair kami; _____

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Ir. Yusuf Supriatna WM, dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan menghukum terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan; _____
3. Membayar uang pengganti sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan jika uang pengganti tersebut tidak dibayar paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan jika terdakwa tidak mempunyai harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun; _____
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. Surat Keputusan Bupati Kendari Nomor: 296 Tahun 2001 tanggal 19 Mei 2001 beserta lampirannya tentang pengangkatan sebagai Pj. Kepala Dinas Kehutanan Kab. Kendari; _
 2. 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi Pelunasan Tunggakan PSDH dan DR PT. Duta Sulawesi Agro tanggal 16 Januari 2003 sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah); _____
 3. 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi Biaya Administrasi pada Kantor Piutang dan Lelang Negara Cabang Kendari untuk penyelesaian Piutang PT. Duta Sulawesi Agro tanggal 29 Januari 2003 sebesar Rp. 44.500.000,- (empat puluh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



empat juta lima ratus ribu
rupiah); _____

Dikembalikan kepada Ir. Yusuf Supriatna; _____

4. Surat Gubernur Sultra Nomor:
912/5723 Perihal
Pertanggungjawaban

Pengurusan piutang Negara atas
tunggakan PSDH dan DR tanggal
31 Desember 2004 kepada
Bupati Konawe; _____

5. Surat Kepala Dinas Kehutanan
Kab. Konawe No: 973/378 tahun
2005 tanggal 17 Februari 2005
Perihal Tunggakan PSDH dan
DR PT. Duta Sulawesi Agro; _____

6. Surat Kepala Dinas Kehutanan
Kab. Konawe, No. 973/857/005
tanggal 4 April 2005 Perihal
Pertanggungjawaban
Pengurusan Piutang Negara atas
Tunggakan PSDH dan DR PT.
Duta Sulawesi Agro; _____

7. Surat Bupati Konawe No.
542/696 tanggal 20 April 2006
Perihal Konfirmasi Pos Audit; _____

8. Surat Bupati Konawe 900/973
tanggal 22 Mei 2006 Perihal
Setoran PSDH dan DR PT. Duta
Sulawesi Agro; _____

9. Surat Bupati Konawe 522/481
tanggal 4 juni 2008 Perihal
Tunggakan PSDH dan DR; _____

Dikembalikan kepada Ir. H. ABD. RAIS. B., M.Si; _____

10. 1 (satu) lembar fotocopy Surat
Kepala Dinas Kehutanan
Kabupaten Kendari kepada



Pimpinan PT. Duta Sulawesi
agro, No: 973/556.A/
Dk.KDI/2001 tanggal 30 Maret
2001 Perihal Peringatan I; _____

11. 1 (satu) lembar fotocopy Surat
Kepala Dinas Kehutanan
Kabupaten Kendari kepada
Pimpinan PT. Duta Sulawesi
agro, No: 973/223/Dk.
KDI/2001 tanggal 9 Oktober
2001 Perihal Peringatan II; _____

12. 1 (satu) lembar fotocopy Surat
Kepala Dinas Kehutanan
Kabupaten Kendari kepada
Pimpinan PT. Duta Sulawesi
agro, No: 973/2924/
Dk.KDI/2001 tanggal 31
Desember 2001 Perihal
Peringatan III; _____

13. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat
Dinas Kehutanan Kabupaten
Kendari yang ditujukan kepad
Kepala Badan Urusan Piutang
Lelang Negara Kendari, No:
973/520/DK.KDI/ KDI/2002
Tanggal 28 Maret 2002 perihal
Penyerahan Urusan Piutang
Negara; _____

14. 3 (tiga) lembar fotocopy Surat
Dinas Kehutanan Kab. Kendari
yang ditujukan Kepala Badan
Urusan Piutang Lelang Negara
Kendari No: 973/580/KDI/2002
tanggal 28 Maret 2002 Perihal
Lampiran Surat Penyerahan
Pengurusan Piutang Negara; _____



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 15.1 (satu) eksemplar fotocopy Keputusan Menteri Kehutanan RI. No. 613/KPTS-IV/1992 tanggal 15 Juni 1992 Tentang Tata Cara Pengenaan, Pemungutan, Penyetoran, Penyimpanan dan Penggunaan dana reboisasi; _____
- 16.1 (satu) eksemplar fotocopy Keputusan Menteri Kehutanan RI. No. 614/KPTS-IV/1992 tanggal 15 Juni 1992 Tentang Tata Cara Pengenaan, Pemungutan, Penyetoran dan Pembayaran Iuran Hasil Hutan; _
- 17.1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi Pelunasan Tunggal PSDH dan DR PT. Duta Sulawesi Agro sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) tanggal 16 Januari 2003; _____
18. Fotocopy Surat No. SE.04/VI-BIKPH/2005 tanggal 30 Maret 2005 Perihal Tunggal PSDH; _
19. Fotocopy Surat Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Sulawesi Tenggara kepada Kepala Dinas Kehutanan Kab. Konawe tanggal Nomor: 361/231/KDST tanggal 24 April 2008 Perihal Tunggal PSDH dan DR; ____
- 20.1 (satu) lembar fotocopy faktur pembelian Mobil Toyota dari PT. Toyota Astra Motor tanggal 30 Nopember 2001; _____

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



21. 1 (satu) lembar fotocopy faktur pembelian Mobil Toyota dari PT. Toyota Astra Motor tanggal 25 Maret 2003; _____
22. 1 (satu) lembar fotocopy STNK DT 9021 A mobil truck Toyota Dyna; _____
23. 1 (satu) lembar fotocopy STNK DT 9022 A Mobil truck Toyota Dyna; _____
24. Fotocopy Laporan Tahunan barang inventaris Periode Januari Tahun 2008 sampai dengan 31 Desember 2008; _____
25. Fotocopy Laporan Tahunan barang inventaris Periode Januari Tahun 2007 sampai dengan 31 Desember 2007; _____
26. Fotocopy Laporan Tahunan barang inventaris Periode Januari Tahun 2006 sampai dengan 31 Desember 2006; _____
27. Fotocopy Laporan Tahunan barang inventaris Periode Januari Tahun 2005 sampai dengan 31 Desember 2005; _____
28. Fotocopy Laporan Tahunan barang inventaris Periode Januari Tahun 2004 sampai dengan 31 Desember 2004; _____

Tetap terlampir dalam berkas perkara; _____

29. 1 (satu) Bundel berkas Piutang PT. Duta Sulawesi Agro, **dikembalikan kepada PANJANANTO TEHP, SH.,**



(Kantor KP2LN Kendari) ; __

5. Menetapkan Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah); _____

- Telah mendengar pembelaan terdakwa melalui penasihat hukumnya pada tanggal 20 Juni 2011 yang pada pokoknya memohon putusan : _____
- Menyatakan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana baik dalam dakwaan primair maupun subsidair penuntut umum tersebut; _____
- Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan tersebut, setidak-tidaknya menyatakan terdakwa lepas dari segala tuntutan hukum; _____
- Memulihkan harkat dan martabat serta kemampuan dan kedudukan terdakwa sebagaimana semula; _____
- Memerintahkan penuntut umum untuk membebaskan terdakwa segera setelah putusan ini diucapkan; _____

• Telah mendengar replik dari Penuntut Umum yang tetap pada tuntutananya dan Duplik dari Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang tetap pada pembelaannya; _____

_____ Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan Nomor. Reg. Perkara: PDS-01/RP-9/Ep./Ft.1/01/2011 sebagai berikut: _____

DAKWAAN; _____

PRIMAIR ; _____

_____ Bahwa ia terdakwa **Ir. YUSUF SUPRIATNA, WM**, antara bulan Januari 2003 sampai dengan bulan Februari 2003 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2003, di Unaaha, Kab. Kendari (sekarang Kab. Konawe) atau setidak-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Unaaha, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut: _____



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa **Ir. YUSUF SUPRIATNA, WM**, selaku Kepala Dinas Kehutanan Kab. Kendari (Kab. Konawe) yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kendari Nomor: 296 Tahun 2001 tanggal 19 Mei 2001 pada waktu sekitar Tahun 2003, berdasarkan Surat Izin Pemanfaatan Kayu dari Kanwil Kehutanan Provinsi Sulawesi Tenggara, Nomor: SK:45/Kpts/Kwl-3/VI/1999 bahwa PT Duta Sulawesi Agro selaku Pemegang izin pemanfaatan kayu (IPK) di wilayah Rauta Kecamatan Asera Kab. Kendari yang sesuai Surat Perhitungan Tahunan Hak Penguasaan Hutan (SPT.HPH) Tahun Anggaran 1999/2000 mempunyai tunggakan Iuran Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi (DR) yang harus dibayarkan yaitu:
 - a. Iuran PSDH (Provisi Sumber Daya Hutan) Pokoknya sebesar Rp. 186.779.591,75; _____
 - b. DR (Dana Reboisasi) pokoknya sebesar Rp. 58.206.047,45 dan US \$ 78.552,82; _____

Atas tunggakan tersebut terdakwa Ir. YUSUF SUPRIATNA, WM selaku Kepala Dinas Kehutanan Kab. Kendari telah melakukan penagihan melalui surat teguran/peringatan kepada Pimpinan PT. DUTA SULAWESI AGRO Cabang Kendari masing-masing: _____

1. Surat No. 973/556.A/Dk-KD/2001 Tanggal 30 Maret 2001 Perihal Peringatan I mengenai tunggakan PSDH DR PT. DUTA SULAWESI AGRO; _____
2. Surat No. 973/223/Dk-KDI/2001 Tanggal 9 Oktober 2001 Perihal Peringatan II Mengenai tunggakan PSDH DR PT. DUTA SULAWESI AGRO; _____
3. Surat No. 973/2924/Dk-KDI/2001 Tanggal 31 Desember 2001 Perihal Peringatan III Mengenai tunggakan PSDH DR PT. DUTA SULAWESI AGRO ; _____

- Bahwa mengingat melalui penyampaian Surat Teguran I, II dan III tersebut Pihak PT. DUTA SULAWESI AGRO Cabang Kendari belum menindaklanjuti Tunggakan PSDH dan DR, maka terdakwa Ir. YUSUF SUPRIATNA, WM selaku Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Kendari menyerahkan pengurusan penyelesaian tunggakan Iuran PSDH dan DR PT. DUTA SULAWESI AGRO Cabang Kendari kepada Badan Urusan Piutan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Lelang Negara Kendari melalui Surat No: 973/580/KDI/2002 tanggal 28 Maret 2002 Perihal Penyerahan Urusan Piutang Negara, kemudian Ir. YUSUF SUPRIATNA, WM menarik kembali pengurusan penyelesaian tunggakan PSDH dan DR PT. DUTA SULAWESI AGRO yang dilakukan oleh Kantor Urusan Pelayanan Piutang dan Lelang Negara (KP2LN) Kendari tersebut melalui surat Nomor: 973/182/Dk-Kdi/2003 tanggal 4 Februari 2003 kepada KP2LN dengan pertimbangan bahwa Pihak PT. DUTA SULAWESI AGRO beritikad baik untuk menyelesaikan tunggakan PSDH dan DR secara bertahap dengan melampirkan kwitansi pembayaran tanggal 16 Januari 2003 yang berisikan bahwa terdakwa telah menerima Pembayaran pelunasan Tunggakan PSDH dan DR PT. DUTA SULAWESI AGRO sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan selanjutnya Ketua Panitia Urusan Piutang Negara Cabang Sulawesi Tenggara menyerahkan kembali pengurusan Piutang PSDH dan DR PT. DUTA SULAWESI AGRO kepada Dinas Kehutanan Kab. Kendari melalui surat Nomor: S-13/PUPNC.25/2003 tanggal 18 Maret 2003 Perihal Persetujuan Penarikan Pengurusan Piutang Negara dan hal tersebut disampaikan pula kepada PT. Duta Sulawesi Agro melalui surat Nomor: SPPNS-12/PUPNC.25/2003 tanggal 18 Maret 2003 Perihal Pernyataan Pengurusan Piutang Negara Selesai; _____

- Padahal terdakwa mengetahui bahwa terdakwa tidak berhak menerima pembayaran penyelesaian tunggakan PSDH dan DR PT. Duta Sulawesi Agro dengan cara diterima langsung maupun dalam bentuk kompensasi lainnya, karena hal tersebut bertentangan dengan: _____
 - a. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1998 tentang Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) Pasal 4 Ayat (1) yang pada pokoknya menyebutkan bahwa Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) wajib di setor langsung ke kas Negara; _____
 - b. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2002 tentang Dana Reboisasi dalam Pasal 7 Ayat (1) yang pada pokoknya menyebutkan bahwa wajib bayar menyeter dana reboisasi ke kas Negara; _____



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh terdakwa Ir. YUSUF SUPRIATNA WM telah memperkaya diri terdakwa atau orang lain atau sesuatu korporasi yang dapat mengakibatkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) atau setidaknya tidaknya sekitar sejumlah tersebut; _____

_____ _ Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang RI. Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI. Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; _____

SUBSIDIAR; _____

_____ _ Bahwa ia terdakwa **Ir. YUSUF SUPRIATNA, WM**, pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut: _____

- Bahwa terdakwa **Ir. YUSUF SUPRIATNA, WM**, selaku Kepala Dinas Kehutanan Kab. Kendari (Kab. Konawe) yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kendari Nomor: 296 Tahun 2001 tanggal 19 Mei 2001 yang mempunyai tugas yaitu melaksanakan penataan, reboisasi, pemamfaatan dan pengawasan hutan dan kehutanan di wilayah Kab. Kendari (sekarang Kab. Konawe) pada waktu sekitar tahun 2003, berdasarkan Surat Izin Pemanfaatan Kayu dari Kanwil Kehutanan Provinsi Sulawesi Tenggara, Nomor: SK:45/Kpts/Kw1-3/VI/1999 bahwa PT Duta Sulawesi Agro selaku Pemegang izin pemamfaatan kayu (IPK) di wilayah Rauta Kecamatan Asera Kab. Kendari yang sesuai Surat Perhitungan Tahunan Hak Penguasaan Hutan (SPT.HPH) Tahun Anggaran 1999/2000 mempunyai tunggakan Iuran Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi (DR) yang harus dibayarkan yaitu: _____

- a. Iuran PSDH (Provisi Sumber Daya Hutan) Pokoknya sebesar Rp. 186.779.591,75; _____
- b. DR (Dana Reboisasi) pokoknya sebesar Rp. 58.206.047,45 dan US \$ 78.552,82; _____



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas tunggakan tersebut terdakwa Ir. YUSUF SUPRIATNA, WM selaku Kepala Dinas Kehutanan Kab. Kendari telah melakukan penagihan melalui surat teguran/peringatan kepada Pimpinan PT. DUTA SULAWESI AGRO Cabang Kendari masing-masing: _____

1. Surat No. 973/556.A/Dk-KD/2001 Tanggal 30 Maret 2001 Perihal Peringatan I mengenai tunggakan PSDH DR PT. DUTA SULAWESI AGRO; _____
2. Surat No. 973/223/Dk-KDI/2001 Tanggal 9 Oktober 2001 Perihal Peringatan II Mengenai tunggakan PSDH DR PT. DUTA SULAWESI AGRO; _____
3. Surat No. 973/2924/Dk-KDI/2001 Tanggal 31 Desember 2001 Perihal Peringatan III Mengenai tunggakan PSDH DR PT. DUTA SULAWESI AGRO ; _____

- Bahwa mengingat melalui penyampaian Surat Teguran I, II dan III tersebut Pihak PT. DUTA SULAWESI AGRO Cabang Kendari belum menindaklanjuti Tunggakan PSDH dan DR, maka terdakwa Ir. YUSUF SUPRIATNA, WM selaku Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Kendari menyerahkan pengurusan penyelesaian tunggakan Iuran PSDH dan DR PT. DUTA SULAWESI AGRO Cabang Kendari kepada Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara Kendari melalui Surat No: 973/580/KDI/2002 tanggal 28 Maret 2002 Perihal Penyerahan Urusan Piutang Negara, kemudian Ir. YUSUF SUPRIATNA, WM menarik kembali pengurusan penyelesaian tunggakan PSDH dan DR PT. DUTA SULAWESI AGRO yang dilakukan oleh Kantor Urusan Pelayanan Piutang dan Lelang Negara (KP2LN) Kendari tersebut melalui surat Nomor: 973/182/Dk-Kdi/2003 tanggal 4 Februari 2003 kepada KP2LN dengan pertimbangan bahwa Pihak PT. DUTA SULAWESI AGRO beritikad baik untuk menyelesaikan tunggakan PSDH dan DR secara bertahap dengan melampirkan kwitansi pembayaran tanggal 16 Januari 2003 yang berisikan bahwa terdakwa telah menerima Pembayaran pelunasan Tunggakan PSDH dan DR PT. DUTA SULAWESI AGRO sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan selanjutnya Ketua Panitia Urusan Piutang Negara Cabang Sulawesi Tenggara menyerahkan kembali pengurusan Piutang PSDH dan DR PT. DUTA SULAWESI AGRO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada Dinas Kehutanan Kab. Kendari melalui surat Nomor: S-13/PUPNC.25/2003 tanggal 18 Maret 2003 Perihal Persetujuan Penarikan Pengurusan Piutang Negara dan hal tersebut disampaikan pula kepada PT. Duta Sulawesi Agro melalui surat Nomor: SPPNS-12/PUPNC.25/2003 tanggal 18 Maret 2003 Perihal Pernyataan Pengurusan Piutang Negara Selesai; _____

- Padahal terdakwa mengetahui bahwa terdakwa tidak berhak menerima pembayaran penyelesaian tunggakan PSDH dan DR PT. Duta Sulawesi Agro dengan cara diterima langsung maupun dalam bentuk kompensasi lainnya, karena hal tersebut bertentangan dengan: _____

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1998 tentang Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) Pasal 4 Ayat (1) yang pada pokoknya menyebutkan bahwa Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) wajib di setor langsung ke kas Negara; _
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2002 tentang Dana Reboisasi dalam Pasal 7 Ayat (1) yang pada pokoknya menyebutkan bahwa wajib bayar menyeter dana reboisasi ke kas Negara; _

- Namun tanpa mengindahkan ketentuan tersebut terdakwa Ir. YUSUF SUPRIATNA, WM dengan menyalahgunakan kewenangan yang ada padanya selaku Kepala Dinas Kehutanan Kab. Kendari (Konawe) sehubungan dengan pengelolaan penerimaan pembayaran PSDH dan DR pada Dinas Kehutanan Kab. Kendari telah menerima pembayaran tunggakan PSDH (Provisi Sumber Daya Hutan) dan DR (Dana Reboisasi) PT. Duta Sulawesi Agro tersebut diatas yang tidak sesuai prosedur yang seharusnya menjadi penerimaan Negara, sehingga perbuatan terdakwa tersebut telah menguntungkan diri terdakwa atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat mengakibatkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar sejumlah tersebut; _

_____ _ Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang RI. Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI. Nomor 20 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2001 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; _____

____ Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, terdakwa menyatakan mengerti dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan; _____

____ Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa : _____

1. Surat Keputusan Bupati Kendari Nomor: 296 Tahun 2001 tanggal 19 Mei 2001 beserta lampirannya tentang pengangkatan sebagai Pj. Kepala Dinas Kehutanan Kab. Kendari; _
2. 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi Pelunasan Tunggal PSDH dan DR PT. Duta Sulawesi Agro tanggal 16 Januari 2003 sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah); _____
3. 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi Biaya Administrasi pada Kantor Piutang dan Lelang Negara Cabang Kendari untuk penyelesaian Piutang PT. Duta Sulawesi Agro tanggal 29 Januari 2003 sebesar Rp. 44.500.000,- (empat puluh empat juta lima ratus ribu rupiah); _____
4. Surat Gubernur Sultra Nomor: 912/5723 Perihal Pertanggungjawaban Pengurusan piutang Negara atas tunggaa PSDH dan DR tanggal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 31 Desember 2004 kepada Bupati Konawe; _____
5. Surat Kepala Dinas Kehutanan Kab. Konawe No: 973/378 tahun 2005 tanggal 17 Februari 2005 Perihal Tunggakan PSDH dan DR PT. Duta Sulawesi Agro; _____
6. Surat Kepala Dinas Kehutanan Kab. Konawe, No. 973/857/005 tanggal 4 April 2005 Perihal Pertanggungjawaban Pengurusan Piutang Negara atas Tunggakan PSDH dan DR PT. Duta Sulawesi Agro; _____
7. Surat Bupati Konawe No. 542/696 tanggal 20 April 2006 Perihal Konfirmasi Pos Audit; _____
8. Surat Bupati Konawe 900/973 tanggal 22 Mei 2006 Perihal Setoran PSDH dan DR PT. Duta Sulawesi Agro; _____
9. Surat Bupati Konawe 522/481 tanggal 4 juni 2008 Perihal Tunggakan PSDH dan DR; _____
10. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Kendari kepada Pimpinan PT. Duta Sulawesi agro, No: 973/556.A/Dk.KDI/2001 tanggal 30 Maret 2001 Perihal Peringatan I; _____
11. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Kendari kepada Pimpinan PT. Duta Sulawesi agro, No: 973/223/Dk.KDI/



2001 tanggal 9 Oktober 2001

Perihal Peringatan II; _____

12. 1 (satu) lembar fotocopy Surat

Kepala Dinas Kehutanan

Kabupaten Kendari kepada

Pimpinan PT. Duta Sulawesi

agro, No: 973/2924/Dk.KDI/

2001 tanggal 31 Desember 2001

Perihal Peringatan III; _____

13. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat

Dinas Kehutanan Kabupaten

Kendariyang ditujukan kepad

Kepala Badan Urusan Piutang

Lelang Negara Kendari, No:

973/520/DK.KDI/KDI/2002

Tanggal 28 Maret 2002 perihal

Penyerahan Urusan Piutang

Negara; _____

14. 3 (tiga) lembar fotocopy Surat

Dinas Kehutanan Kab. Kendari

yang ditujukan Kepala Badan

Urusan Piutang Lelang Negara

Kendari No: 973/ 580/KDI/2002

tanggal 28 Maret 2002 Perihal

Lampiran Surat Penyerahan

Pengurusan Piutang Negara; ____

15. 1 (satu) eksemplar fotocopy

Keputusan Menteri Kehutanan

RI. No. 613/ KPTS-IV/1992

tanggal 15 Juni 1992 Tentang

Tata Cara Pengenaan,

Pemungutan, Penyetoran,

Penyimpanan dan Penggunaan

dana reboisasi; _____

16. 1 (satu) eksemplar fotocopy

Keputusan Menteri Kehutanan



RI. No. 614/ KPTS-IV/1992
tanggal 15 Juni 1992 Tentang
Tata Cara Pengenaan,
Pemungutan, Penyetoran dan
Pembayaran Iuran Hasil Hutan; _

17.1 (satu) lembar fotocopy
Kwitansi Pelunasan Tunggakan
PSDH dan DR PT. Duta
Sulawesi Agrosebesar Rp.
250.000.000,- (dua ratus lima
puluh juta rupiah) tanggal 16
Januari 2003; _____

18. Fotocopy Surat No. SE.04/VI-
BIKPH/2005 tanggal 30 Maret
2005 Perihal Tunggakan PSDH; _

19. Fotocopy Surat Kepala Dinas
Kehutanan Propinsi Sulawesi
Tenggara kepada Kepala Dinas
Kehutanan Kab. Konawe
tanggal Nomor:361/231/KDST
tanggal 24 April 2008 Perihal
Tunggakan PSDH dan DR; _____

20.1 (satu) lembar fotocopy faktur
pembelian Mobil Toyota dari PT.
Toyota Astra Motor tanggal 30
Nopember 2001; _____

21.1 (satu) lembar fotocopy faktur
pembelian Mobil Toyota dari PT.
Toyota Astra Motor tanggal 25
Maret 2003; _____

22.1 (satu) lembar fotocopy STNK
DT 9021 A mobil truck Toyota
Dyna; _____

23.1 (satu) lembar fotocopy STNK
DT 9022 A Mobil truck Toyota
Dyna; _____



24. Fotocopy Laporan Tahunan barang inventaris Periode Januari Tahun 2008 sampai dengan 31 Desember 2008; _____
25. Fotocopy Laporan Tahunan barang inventaris Periode Januari Tahun 2007 sampai dengan 31 Desember 2007; _____
26. Fotocopy Laporan Tahunan barang inventaris Periode Januari Tahun 2006 sampai dengan 31 Desember 2006; _____
27. Fotocopy Laporan Tahunan barang inventaris Periode Januari Tahun 2005 sampai dengan 31 Desember 2005; _____
28. Fotocopy Laporan Tahunan barang inventaris Periode Januari Tahun 2004 sampai dengan 31 Desember 2004; _____
29. 1 (satu) Bundel berkas Piutang PT. Duta Sulawesi Agro; _____

_____ Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agama mereka masing-masing dan keterangan tersebut pada pokoknya sebagai berikut : _____

1. **Ir. ABD. RAIS B., M.Si;** _____

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan berkaitan dengan masalah iuran Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan iuran Dana Reboisasi (DR); _____
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa pada saat saksi sama-sama bekerja dengan terdakwa di Dinas Kehutanan Kabupaten Konawe dan saksi sebagai staff sedangkan terdakwa sebagai Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Konawe, dahulu Kabupaten Kendari; _____



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menjabat sebagai Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Konawe sejak Tahun 1999 sampai dengan Tahun 2003; _____
- Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Konawe Tahun 2005; _____
- Bahwa berkaitan dengan iuran PSDH dan DR mekanisme pembayarannya adalah perusahaan yang mendapat izin HPH, IPK atau ISR kemudian melakukan kegiatan penebangan dan hasil penebangan tersebut dibuat Laporan Hasil Produksi (LHP) setiap sepuluh hari atau dalam satu bulan sebanyak 3 (tiga) priode, hasil LHP tersebut diajukan ke pejabat pengesahan LHP untuk disahkan dan kemudian diterbitkan SPP/SPM oleh pejabat penagih. SPP/SPM tersebut sebagai dasar perusahaan-perusahaan pemegang izin wajib membayar PSDH dan DR ke kas negara melalui rekening Menteri Kehutanan; _____
- Bahwa pada Tahun 2003, sesuai data yang ada pada Dinas Kehutanan Kabupaten Konawe ada perusahaan pemegang IPK yang belum menyetor dana PSDH dan DR ke kas Negara yaitu PT. DUTA SULAWESI AGRO;
- Bahwa kaitan perusahaan PT. DUTA SULAWESI AGRO dengan terdakwa sehubungan dengan iuran PSDH dan DR yaitu adanya penerimaan langsung yang berkaitan dengan penyetoran PSDH dan DR; _____
- Bahwa saksi mengetahui adanya penerimaan langsung berkaitan dengan penyetoran PSDH dan DR pada saat serah terima jabatan; _____
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa besar tunggakan PSDH dan DR PT. DUTA SULAWESI AGRO dan yang mengetahui hal tersebut adalah petugas pengelola dana PSDH dan DR Dinas Kabupaten Konawe yaitu La Ode Mangkudadi; _____
- Bahwa sepengetahuan saksi sampai sekarang belum ada tanda bukti setoran PT. DUTA SULAWESI AGRO ke rekening Menteri Kehutanan sesuai ketentuan berlaku; _____
- Bahwa Dinas Kehutanan Kabupaten Konawe sudah pernah melakukan penagihan dan pernah diklarifikasi oleh Ir. Muh. Nasir kepada PT. DUTA SULAWESI AGRO dan dari keterangan PT DUTA SULAWESI AGRO menjelaskan bahwa tunggakan PSDH dan DR sudah dilunasi dan diterima oleh Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Konawe yang pada saat itu dijabat oleh terdakwa yaitu sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah); _____

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dasar saksi mengatakan tunggakan PSDH dan DR sudah dilunasi dan diterima oleh Kadis Kehutanan Kabupaten Konawe dalam hal ini oleh terdakwa yaitu Kwitansi tanggal 16 Januari 2003, yang menerima Kepala Dinas Kehutanan Kab. Kendari, cap tanda tangan Ir. Yusuf Supriatna, WM., sudah diterima dari PT. DUTA SULAWESI AGRO, sejumlah uang Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) buat pelunasan tunggakan PSDH dan DR PT. Duta Sulawesi Agro; _____
- Bahwa tanda bukti kwitansi tersebut tidak serta merta dikatakan bahwa PT. Duta Sulawesi Agro melunasi tunggakan PSDH dan DR karena sampai saat ini belum ada tanda bukti setoran dari PT. Duta Sulawesi Agro ke rekening Menteri Kehutanan sesuai dengan ketentuan yang berlaku; _____
- Bahwa tata cara penyetoran PSDH dan DR diatur dalam Keputusan Menteri Kehutanan No. 271 dan No. 272 Tahun 1993; _____
- Bahwa penyetoran PSDH dan DR dari wajib setor setiap perusahaan langsung menyetor dana PSDH dan DR ke rekening Menteri Kehutanan; _____
- Bahwa penggunaan dana PSDH dan DR disetor terlebih dahulu ke rekening Menteri Kehutanan, setelah itu pusat yang membagi sekian persen untuk pusat, propinsi dan kabupaten; _____
- Bahwa saksi tidak ingat sejak kapan PT. Duta Sulawesi Agro beroperasi di Kabupaten Kendari/Konawe; _____
- Bahwa iuran PSDH dan DR dibayarkan oleh sebuah perusahaan yang mempunyai IPK setelah melakukan kegiatan/produksi; _____
- Bahwa selama PT. Duta Sulawesi Agro beroperasi, ada tunggakan iuran PSDH dan DR yang belum dibayarkan yaitu PSDH sebesar Rp. 272.698.203, 95 (dua ratus tujuh puluh dua juta enam ratus Sembilan puluh delapan ribu dua ratus tiga rupiah Sembilan puluh lima sen) dan DR sebesar Rp. 84.980.829, 28 (delapan puluh empat juta Sembilan ratus delapan puluh ribu delapan ratus dua puluh sembilan rupiah dua puluh delapan sen) dan US \$ 114.687, 12 (seratus empat belas ribu enam ratus delapan puluh tujuh dolar dua belas sen united state); _____
- Bahwa saksi tidak mengetahui sejak kapan tunggakan PSDH dan DR PT. Duta Sulawesi Agro; _____
- Bahwa terdakwa menjabat sebagai Kepala Dinas Kehutanan setelah Tahun 2003 kemudian dijabat oleh M. Nur Sinapoy lalu digantikan oleh Ridman kemudian Muh. Nasir lalu saksi; _____

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak tahu apakah pernah ada perusahaan pemegang HPH dalam hal pembayaran iuran PSDH dan DR diberikan dalam bentuk kompensasi; ___
 - Bahwa saksi tidak tahu mengenai besaran/persen pembagian untuk pusat, propinsi dan kabupaten terhadap iuran PSDH dan DR; _____
 - Bahwa pada saat terdakwa menjabat sebagai kepala dinas, saat itu saksi menjabat sebagai Kasubdit Produksi; _____
 - Bahwa dasar timbulnya suatu tagihan PSDH dan DR PT. Duta Sulawesi Agro adalah berdasar surat dari Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Sulawesi Tenggara yang ditujukan kepada Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Konawe tertanggal 24 April 2008 dengan perihal surat tunggakan PSDH dan DR; _____
 - Bahwa setelah ada surat tersebut, saksi langsung konfirmasi kepada Bupati Konawe lalu Bupati menyuruh saksi untuk membuat konsep surat yang mana surat tersebut ditujukan kepada terdakwa tertanggal 4 Juni 2008 dengan nomor surat 522/481, perihal tunggakan PSDH dan DR; _____
 - Bahwa terhadap surat tersebut terdakwa memberikan tanggapan mengenai kompensasi dua unit mobil truck Toyota Dyna DT 9021 A dan DT 9022 A; _
 - Bahwa mengenai kompensasi dua unit truck tersebut didaftar sebagai inventaris; _____
 - Bahwa dalam daftar inventaris ruangan mobil truck DT 9021 A diperoleh tahun 2001 sedangkan mobil truck Toyota Dyna DT 9022 A, diperoleh Tahun 2002; _____
 - Bahwa masalah tunggakan PSDH dan DR PT. Duta Sulawesi Agro, Dinas Kehutanan Kabupaten Konawe pernah melimpahkan masalah tersebut ke KP2LN; _____
 - Bahwa mekanisme atau langkah-langkah yang dilakukan jika PSDH dan DR suatu perusahaan tidak dibayar yaitu mengirimkan surat teguran (tagihan) kepada perusahaan tersebut sampai semampu kita dan kalau perusahaan tersebut tidak mengindahkan teguran tersebut maka penyelesaiannya dialihkan kepada KP2LN; _____
- Atas keterangan yang diberikan oleh saksi, terdakwa tidak keberatan; _____

2. LA ODE MANGKUDADI; _____



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi terdakwa dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan penyelewengan dana PSDH dan DR Tahun Anggaran 1999 pada Dinas Kehutanan Kabupaten Konawe yang dahulu adalah Kabupaten Kendari; _____
- Bahwa pada Tahun 1999 saksi sebagai staf pada Dinas Kehutanan Kabupaten Kendari/Konawe di seksi tata usaha iuran kehutanan, disamping itu saksi juga ditugaskan sebagai salah seorang penagih PSDH dan DR; _____
- Bahwa jabatan terdakwa saat itu adalah Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Kendari yang sekarang adalah Kabupaten Konawe dan terdakwa menjabat sebagai kepala dinas sejak Tahun 1998 sampai dengan Tahun 2003; _____
- Bahwa tugas saksi selaku penagih PSDH dan DR adalah menghitung kewajiban perusahaan pemegang IPK pada Dinas Kehutanan Kabupaten Konawe dan dasar saksi sebagai pejabat penagih adalah Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Konawe; _____
- Bahwa pengenaan iuran PSDH dan DR terhadap pemegang IPK, HPH dan ijin yang lainnya sehubungan dengan pemanfaatan hasil hutan; _____
- Bahwa mekanisme penagihan PSDH dan DR yaitu setelah perusahaan pemegang izin melakukan kegiatan penebangan dan hasil tebangan tersebut dibuat Laporan Hasil Produksi (LHP) setiap 10 (sepuluh) hari atau dalam satu bulan sebanyak 3 (tiga) priode, hasil LHP tersebut diajukan kepada pejabat pengesah LHP untuk mendapatkan pengesahan dan setelah LHP-nya disahkan lalu LHP tersebut diajukan untuk diterbitkan SPP/SPM oleh pejabat penagih SPP/SPM, kemudian atas dasar tersebut perusahaan wajib menyetor PSDH dan DR ke kas negara melalui rekening Bendahara Penerima Departemen Kehutanan; _____
- Bahwa besarnya iuran PSDH dan DR itu ditentukan dari hasil produksi perusahaan yang mendapat izin dan besar tarifnya berdasarkan tarif yang telah ditentukan dalam table tarif; _____
- Bahwa ada perusahaan pemegang izin yang mempunyai tunggakan PSDH dan DR yaitu Perusahaan PT Duta Sulawesi Agro; _____
- Bahwa perusahaan PT. Duta Sulawesi Agro melakukan pengolahan berdasarkan SK Kepala Kantor Wilayah Kehutanan Propinsi Sulawesi Tenggara berupa IPK; _____
- Bahwa besar tunggakan PT. Duta Sulawesi Agro PSDH sebesar Rp. 186.779.591,75 (seratus delapan puluh enam juta tujuh ratus tujuh puluh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tujuh sembilan ribu lima lima ratus sembilan puluh satu rupiah tujuh puluh lima sen); _____

- Bahwa terhadap tunggakan iuran PSDH dan DR PT. Duta Sulawesi Agro pernah dilakukan penagihan sebanyak tiga kali dalam bentuk surat teguran; _
- Bahwa barang bukti Surat Peringatan I dengan Nomor: 973/556.A/DK. KDI/2001, Surat Peringatan II Nomor: 973/2331/DK. KDI/2001 dan Surat Peringatan III Nomor: 973/2924/DK. KDI/2001 adalah benar surat teguran yang ditujukan kepada PT. Duta Sulawesi Agro; _____
- Bahwa setelah tidak ada tindak lanjut dari PT. Duta Sulawesi Agro setelah dilakukan tiga kali teguran kemudian langkah yang diambil oleh Dinas Kehutanan Kabupaten Konawe adalah menyerahkan kepada KP2LN; _____
- Bahwa setelah diserahkan kepada KP2LN masalah tunggakan tersebut tidak selesai melainkan adanya persetujuan masalah tunggakan tersebut ditarik kembali dan saksi tidak mengetahui mengapa tunggakan tersebut ditarik kembali; _____
- Bahwa saksi tidak tahu sejak kapan PT Duta Sulawesi Agro berdiri di Kabupaten Konawe namun sepengetahuan saksi PT. Duta Sulawesi Agro sudah tidak beroperasi lagi; _____
- Bahwa apabila Kementerian Kehutanan sudah menerima iuran PSDH dan DR akan ada pemberitahuan dalam jangka waktu tertentu dan perusahaan wajib melaporkan ke Dinas Kehutanan apabila sudah membayar iuran PSDH dan DR; _____
- Bahwa cara menghitung iuran PSDH berdasarkan Laporan Hasil Produksi (LHP) berupa volume x tarif x harga patokan sedangkan DR berdasarkan LHP berupa volume x tarif dan perusahaan dikenakan wajib iuran PSDH dan DR setelah membuat LHP dan tolak ukur untuk menentukan besaran PSDH dan DR berdasarkan SPT Tahunan; _____
- Bahwa suatu perusahaan diketahui telah membayar iuran PSDH dan DR dari bukti slip penyetoran yang disampaikan kepada Dinas Kehutanan Kabupaten Konawe; _____
- Bahwa PT. Duta Sulawesi Agro sudah ada slip penyetorannya akan tetapi tidak sesuai dengan pembayaran iuran yang harus dibayarkan; _____
- Bahwa jika suatu menunggak pembayaran iuran PSDH dan DR dikenakan bunga sebesar 2%; _____



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap fotocopy kwitansi pelunasan PSDH dan DR PT. Duta Sulawesi Agro tertanggal 16 Januari 2003 baru saksi ketahui setelah diperiksa dipenyidik; _____
- Bahwa sepengetahuan saksi iuran yang diserahkan ke Menteri Kehutanan dalam bentuk uang tidak dalam bentuk lain; _____
- Bahwa saksi pernah mendengar adanya bank garansi dan bank garansi dilampirkan setiap IPK dimohonkan ke Kantor Wilayah Kehutanan dan besaran bank garansi tergantung dari cruising perhitungan awal taksasi nilai yang akan diproduksi; _____
Atas keterangan yang diberikan oleh saksi, terdakwa tidak keberatan; _____

3. Drs. MUHSIN S.; _____

- Bahwa sepengetahuan saksi terdakwa dihadapkan dipersidangan sehubungan ada masalah dugaan penyelewengan dana PSDH dan DR Tahun Anggaran 1999 pada Dinas Kehutanan Kabupaten Konawe yang dahulu adalah Kabupaten Kendari; _____
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa pada akhir masa jabatannya sebagai Kepala Dinas Kehutanan Tahun 2003, dimana saat itu saksi baru pindah dari Sekretariat Pemda Konawe ke Dinas Kehutanan Kabupaten Konawe; _____
- Bahwa pada Tahun 2003 saksi menjabat sebagai Kasi Sarana dan Prasarana, Pada Tahun 2004 sampai dengan Tahun 2007 saksi menjabat sebagai Kasubag Umum dan Perlengkapan dan pada Tahun 2007 sampai sekarang saksi menjabat sebagai Kasubag Keuangan dan Perlengkapan; _____
- Bahwa tugas-tugas saksi sebagai Kasubag Umum dan Perlengkapan adalah membantu melaksanakan tugas-tugas sekretariat, mencatat surat masuk, mencatat barang inventaris, pengadaan barang dan jasa; _____
- Bahwa saksi mencatat semua barang inventaris yang ada di Kantor Dinas Kehutanan Kabupaten Konawe termasuk mobil dan dalam catatan barang inventaris ada dua unit mobil truck Toyota Dyna dengan nopol DT 9021 A dan DT 9022 A; _____
- Bahwa saksi tidak mengetahui asal usul dua unit mobil truk tersebut dan saksi hanya lihat dari laporan inventaris bahwa kedua mobil truck itu pengadaan Pemda Konawe Tahun 2001 dan 2002, namun saksi tidak ingat lagi berapa nilai belinya; _____
- Bahwa dasar saksi mengatakan bahwa mobil truck Toyota Dyna nopol DT 9021 A dibeli Tahun 2001 dan mobil truck Toyota Dyna dengan nopol DT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9022 A dibeli Tahun 2002 karena ada laporan register pada saat saksi masuk menjadi Kasubag Umum dan Perlengkapan; _____

- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ada arsip pengadaan dua unit kendaraan tersebut; _____
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar kompensasi tentang dana PSDH dan DR; _____
- Bahwa kedua unit kendaraan tersebut masih ada barangnya sampai dengan sekarang; _____
- Bahwa saksi tidak tahu sumber dana pengadaan mobil truck tersebut; _____
- Bahwa saksi tidak tahu asal muasal truck tersebut; _____

Atas keterangan yang diberikan saksi, terdakwa menyatakan keberatan bahwa tidak benar mobil tersebut adalah pengadaan Pemda Konawe akan tetapi mobil tersebut berasal dari kompensasi iuran PSDH dan DR dan atas sanggahan terdakwa, saksi tetap pada keterangannya; _____

4. Ir. H. HAMAL JAYA; _____

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan dugaan penyelewengan dana iuran PSDH dan DR; _____
- Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Sulawesi Tenggara sejak tanggal 25 Februari 2008; _____
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Kepala Dinas Kehutanan Propinsi adalah memberikan pertimbangan teknis dibidang kehutanan yaitu bidang bina produksi kehutanan, bidang rehabilitasi lahan perhutanan, bidang tata guna hutan, bidang perlindungan hutan, bidang administrasi dan kepegawaian; _____
- Bahwa sepengetahuan saksi mekanisme pembayaran PSDH dan DR adalah bahwa perusahaan yang memiliki izin HPH, IPK atau Izin Sah Lainnya (ISL) kemudian melakukan kegiatan penebangan dan hasil tebangan tersebut dibuat LHP (laporan hasil produksi) setiap 10 harinya atau dalam satu bulan sebanyak 3 (tiga) priode, hasil LHP tersebut diajukan kepada Pejabat Pengesah LHP (pemerintah/dinas kehutanan) untuk mendapat pengesahan dan setelah disahkan LHP-nya maka perusahaan tersebut mengajukan LHP untuk diterbitkan SPP atau SPM oleh Pejabat Penagih SPP, dasar SPP dan



SPM perusahaan kemudian wajib menyetor PSDH dan DR ke kas Negara melalui rekening bendahara penerima Departemen Kehutanan; _____

- Bahwa Dinas Kehutanan Propinsi mengetahui adanya pembayaran dilakukan oleh perusahaan pemilik izin HPH, IPK atau ISL dari proses monitoring oleh Dinas Kehutanan Kabupaten/Kota tentang realisasi penerimaan PSDH dan DR melalui laporan realisasi penerimaan PSDH dan DR yang mana setiap jatuh tempo atau tenggang waktu satu bulan setelah penerbitan SPP dan SPM tersebut oleh Pejabat Penagih dan apabila pihak perusahaan tidak melunasi atau membayar maka pihak dinas kabupaten memberikan teguran pertama agar segera melunasi kewajibannya dan pada saat itu pelayanan administrasi dihentikan dan dikenakan denda bunga 2% dari tunggakan PSDH dan DR nya namun setelah tenggang waktu 1 bulan kewajiban tersebut belum dibayar maka diberikan teguran kedua dengan tenggang waktu 30 hari dan selanjutnya apabila dalam jangka waktu tersebut belum juga dilakukan pembayaran maka diberikan teguran ketiga selama tenggang waktu 30 hari dan apabila sampai teguran ketiga belum dilunasi maka pihak Dinas Kehutanan Kabupaten dapat menyerahkan kepada Badan Urusan Piutang Lelang Negara (KP2LN) dan hal tersebut sudah merupakan kewajiban BPULN untuk melakukan penagihan; _____
- Bahwa untuk menentukan besarnya dana PSDH dan DR yang harus dibayarkan oleh pihak perusahaan maka setiap 6 bulan dilakukan evaluasi harga pasaran hasil hutan kemudian setelah itu dilakukan perubahan dengan surat keputusan menteri kehutanan berdasarkan jenis dan diameter, makin besar diameternya maka harganya makin mahal; _____
- Bahwa pada Tahun 2003 berdasarkan Izin IPK yang dikeluarkan oleh Kanwil Dinas Kehutanan Propinsi Sulawesi Tenggara pada Tahun 1997 yang berlokasi di Rota Kabupaten Kendari ada izin HPH yang diterbitkan atas nama PT. Duta Sulawesi Agro dan kemudian pada saat saksi menjabat sebagai Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Sulawesi Tenggara ada hasil rekonsiliasi yang membahas tentang tunggakan-tunggakan PSDH dan DR serta realisasi penerimaannya kemudian diketahui bahwa masih ada tunggakan yang belum dibayar oleh PT Duta Sulawesi Agro dan atas dasar tersebut kemudian ditindak lanjuti dengan surat klarifikasi mengenai tunggakan PSDH dan DR ke Dinas Kabupaten Konawe tanggal 24 April 2008 dengan surat Nomor: 361/231/KDST dan ditanggapi oleh Bupati tanggal 24 Juni 2008 dengan surat Nomor: 522/481 perihal tunggakan PSDH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada saudara Ir. Yusuf Supriatna untuk menyetorkan dana PSDH DR yang telah diterimanya; _____

- Bahwa besarnya kewajiban dana PSDH dan DR yang harus dibayarkan oleh PT. Duta Sulawesi Agro yaitu PDH sebesar Rp. 272.698.203,95 dan DR sebesar Rp. 84.980.829,28 dan US \$ 114.687,12; _____
- Bahwa tindak lanjut upaya penyelesaian tunggakan PSDH dan DR yang telah diserahkan PUPLN yaitu berdasarkan Surat Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Konawe Nomor: 973/580/DK-Kdi/2002 tanggal 28 Maret 2002 perihal penyerahan urusan piutang Negara kepada Kepala Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara Kendari namun pada tanggal 4 Februari 2003 berdasarkan Surat Nomor: 973/182/DK-Kdi/2002 perihal penarikan urusan piutang PT. Duta Sulawesi Agro kepada Kepala Kantor Urusan Pelayanan Piutang dan Lelang Negara dengan alasan perusahaan bersangkutan beritikad baik untuk penyelesaian untangnya secara bertahap dibawah pengawasan Dinas Kehutanan Kabupaten Kendari; _____
- Bahwa tindak lanjut terhadap penyelesaian tunggakan PSDH dan DR yaitu pihak Dinas Kehutanan Propinsi Sulawesi Tenggara pernah melakukan klarifikasi dan berdasarkan Surat Bupati Konawe Nomor: 522/481 Tanggal 04 Juni 2008 bahwa tunggakan PSDH dan DR tersebut telah dilunasi oleh perusahaan yang bersangkutan dan diterima langsung oleh Ir. Yusuf Supriatna sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) berdasarkan tanda bukti kwitansi; _____
- Bahwa berdasarkan hasil rekonsiliasi penerimaan PSDH dan DR bulan Juni di Jakarta belum ada penyetoran yang dilakukan ke kas Negara sebesar Rp. 250.000.000,- dan ada pun penerimaan yang diterima langsung oleh terdakwa tidak sesuai dengan prosedur; _____
- Bahwa pelaporan mengenai penyelesaian tunggakan PSDH dan DR PT. Duta Sulawesi Agro tidak diterima dalam bentuk tunai tetapi dikompensasikan dengan 2 unit mobil truck Toyota Dyna dan mengenai hal tersebut pihak Dinas Kehutanan Propinsi Sulawesi Tenggara tidak pernah disampaikan secara resmi namun saksi tidak tahu apakah ada pelaporan yang disampaikan kepada Pihak Dinas Kehutanan Kabupaten Konawe; _____
- Bahwa berdasarkan regulasi kwitansi yang besarnya Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) tidak berkaitan dengan tunggakan PSDH dan DR tapi berdasarkan kwitansi berkaitan; _____

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa walaupun perusahaan pemegang izin sudah tidak memproduksi lagi namun tunggakan PSDH dan DR masih dilakukan penagihan; _____
- Bahwa pembagian PSDH adalah 20% untuk pusat, 80% untuk daerah dan 60% untuk propinsi dan 32% untuk kabupaten penghasil dan 32% untuk kabupaten bukan penghasil sedangkan DR 60% untuk pusat dan 40% langsung ke kabupaten penghasil; _____
- Bahwa bagian untuk kabupaten tidak dapat diambil langsung karena semuanya PNPB mendapatkan bagian dari pusat; _____
- Bahwa saksi saksi tidak mengetahui apakah bukti kwitansi yang besarnya Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dalam bentuk tunai; _____
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menyetero tunggakan berdasarkan kwitansi tersebut; _____
- Bahwa bukti kwitansi Rp. 250.000.000,- tidak dianggap sebagai pembayaran PSDH dan DR ke kas Negara; _____
- Bahwa saksi tidak mengetahui dalam hal pengajuan IPK harus disertai dengan bank garansi; _____
Atas keterangan yang diberikan oleh saksi, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan; _____

5. PANTJANANTO TEHP, SH; _____

- Bahwa saksi bekerja di Kantor KPKNL Kendari sebagai kepala kantor yang sebelum nama kantornya adalah KP2LN; _____
- Bahwa tugas pokok saksi sebagai kepala kantor adalah menyelenggarakan pengelolaan keuangan Negara, pengurusan piutang Negara dan pelayanan lelang; _____
- Bahwa selama saksi sebagai kepala kantor KPKNL, bahwa pihak Dinas Kehutanan Kabupaten Kendari (Konawe) pernah menyerahkan masalah piutang Negara ke KPKNL yaitu tunggakan iuran PSDH dan DR atas nama PT. Duta Sulawesi Agro; _____
- Bahwa penyerahan piutang tersebut berdasarkan Surat Nomor: 973/580/DR-Kdi/2002 Tanggal 28 Maret 2002 yang dibuat oleh Kepala Dinas Kabupaten Kendari (Konawe) atas nama Ir. Yusuf Supriatna; _____
- Bahwa jumlah hutang dari PT. Duta Sulawesi Agro berdasarkan PJPN adalah Rp. 1.024.226.096,55 (satu milyar dua puluh empat juta dua ratus dua puluh enam ribu sembilan puluh enam rupiah lima puluh lima sen) yang terdiri dari



hutang pokok Rp. 637.749.739,20, bunga Rp. 293.364.894, 03 , biaya administrasi urusan piutang Negara 10% dari saldo hutang Rp. 93.111.463,32 dan saksi mengetahuinya dari arsip KP2LN Kendari; _____

- Bahwa jumlah awal penyerahan sudah sesuai, namun berdasarkan Surat Tanggal 07 Oktober 2002 dengan Nomor: 973/1813/DK-Kdi/02 Perihal Koreksi Piutang PT. Duta Sulawesi Agro yang dibuat oleh Kepala Dinas Kehutanan (Terdakwa) maka jumlah piutang setelah dikoreksi dan berdasarkan bukti-bukti dari Kehutanan yang terlampir dalam Surat Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Kendari Nomor: 973/1813/GK-Kdi/02 Tanggal 30 Oktober 2002, kemudian KP2LN melakukan verifikasi terhadap hutang PT. Duta Sulawesi Agro sehingga ditemukan saldo hutang sebesar Rp. 618.046.930,95; _____
- Bahwa berdasarkan koreksi tersebut pihak KP2LN memberitahukan kepada PT. Duta Sulawesi Agro berdasarkan Surat Ketua Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) Cabang Sulawesi Tenggara dengan surat Nomor: SKPBN-01/PUPNC.25/2003 Tanggal 29 Januari 2003, perihal Pemberitahuan Koreksi/Perubahan besaran piutang Negara, tembusan surat kepada Dinas Kehutanan Kabupaten Kendari; _____
- Bahwa setelah menerima penyerahan masalah piutang tersebut selanjutnya pihak KP2LN melakukan penelitian berkas Nomor: RHPK-21/WPL.08/KP/0402/2002 tanggal 02 Juni 2002 tentang Piutang Negara PT. Duta Sulawesi Agro, kemudian diterbitkan Surat Penerimaan Pengurusan Piutang Negara (SP3N) Nomor: 20/PUNPC.25/2002 Tanggal 3 Juni 2002. Setelah itu dilakukan pemanggilan terhadap PT. Duta Sulawesi Agro dengan Surat Nomor: PG-20/WPL.08/KP.04/2002 tanggal 3 Juni 2002, kemudian dilakukan panggilan terakhir kepada PT. Duta Sulawesi Agro dengan surat Nomor: PT-21/WPL.08/KP.04/2002 tanggal 8 September 2002; _____
- Bahwa selama pemanggilan pihak PT. Duta Sulawesi Agro tidak pernah hadir sehingga diterbitkan Penetapan Jumlah Piutang Negara (PJPN) Nomor: PJPN-45/PUNPC.25/2002 tanggal 28 Nopember 2002; _____
- Bahwa PT. Duta Sulawesi Agro belum melakukan pembayaran namun kemudian dari Dinas Kehutanan Kabupaten Kendari (Konawe) melakukan penarikan piutang dengan surat Nomor: 973/182/GK-Kdi.2003; _____
- Bahwa penarikan suatu masalah yang telah dilimpahkan ke KP2LN diperbolehkan saja jika yang bersangkutan sudah merasa mampu untuk menyelesaikan masalah tersebut; _____



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap penarikan piutang oleh Dinas Kehutanan Kabupaten Kendari (Konawe) dikenakan biaya berupa biaya administrasi pengurusan piutang Negara berdasarkan Pasal 309 huruf c Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor: 300/KMK.01/2002 Tanggal 13 Juni 2002 sebesar 2,5% dari saldo hutang; _____
- Bahwa Panitia PJPN menyetujui penarikan piutang oleh Dinas Kehutanan Kabupaten Kendari (Konawe) dalam bentuk persetujuan tertulis setelah membayar biaya administrasi 2,5% dari saldo hutang Rp. 561.859.923,24 yaitu sebesar Rp. 14.046.491,00; _____
- Bahwa yang menjabat Kepala KP2LN saat itu adalah Sugiarto; _____
- Bahwa mengenai kwitansi sejumlah uang sebesar Rp. 44.500.000,- tertanggal 29 Januari 2003 saksi tidak mengetahui; _____
Atas keterangan yang diberikan oleh saksi, terdakwa tidak keberatan; _____

6. IR. TITI ANDIANI; _____

- Bahwa pada Tahun 2003 saksi diangkat sebagai Kepala Bagian Personalia PT. Duta Sulawesi Agro Makassar dengan tugas dan tanggung jawab saksi yaitu penggajian karyawan, pengangkatan dan pemberhentian karyawan; _____
- Bahwa sepengetahuan saksi PT. Duta Sulawesi Agro merupakan anak perusahaan PT. Hadji Kalla yang bergerak dibidang perkebunan kelapa sawit. Adapun kedudukan perusahaan di Makassar sedangkan kegiatan operasionalnya dilakukan di Kecamatan Rauta Kabupaten Konawe, karena lokasinya saat itu masih hutan lalu dibersihkan dulu dan ada kegiatan penebangan kayu dengan izin yang dimiliki berupa izin pemamfaatan kayu (IPK) dan sekarang perusahaan tersebut sudah tutup sejak Tahun 2002; _____
- Bahwa PT. Duta Sulawesi Agro beroperasi di Kecamatan Rauta Kabupaten Konawe sejak Tahun 1998 s/d 2003; _____
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menerbitkan IPK PT. Duta Sulawesi Agro dan saksi juga tidak mengetahui sebab sehingga PT. Duta Sulawesi Agro tutup atau berhenti; _____
- Bahwa sepengetahuan saksi PT. Duta Sulawesi Agro mempunyai tunggakan PSDH dan DR setelah perusahaan tutup dan tunggakan PSDH dan DR PT. Duta Sulawesi Agro adalah Rp. 931.114.633,23 dan berdasarkan hasil pemeriksaan ulang bahwa PSDH dan DR dari pihak perusahaan terrealisir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 369.254.696,00 sehingga tunggakan PSDH dan DR adalah sebesar Rp. 561.859.923,24; _____

- Bahwa sehubungan sisa tunggakan tersebut saksi pernah ke kantor KP2LN pada Tahun 2002, saksi sudah lupa tanggal dan bulannya dan saat itu saksi datang untuk memenuhi panggilan KP2LN kemudian saksi ambil berkas tunggakan tersebut lalu saksi bawa ke Makassar untuk disampaikan kepada Direksi CV Hadji Kalla dan direksi perusahaan adalah almarhum SAMSUL PAWEANGI; _____
- Bahwa setelah saksi tiba di Makassar lalu saksi melaporkan hal tersebut kepada SAMSUL PAWEANGI dan menurut beliau untuk dipelajari dulu dan setelah itu saksi tidak mengikuti lagi perkembangannya. Kemudian saksi mengetahui tindak lanjutnya setelah saksi menerima kwitansi sebesar Rp. 250.000.000,- yang diterima oleh terdakwa dan kwitansi lain berupa biaya administrasi dari KP2LN tertanggal 29 Januari 2003 sebesar Rp. 44.500.000,- yang diterima oleh BAMBANG SULISTYO pihak KP2LN dan dengan adanya kwitansi tersebut perusahaan menganggap bahwa tunggakan PSDH dan DR PT. Duta Sulawesi Agro telah selesai; _____
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti kwitansi pelunasan tunggakan PSDH dan DR PT. Duta Sulawesi Agro sebesar Rp. 250.000.000,- ; _____
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada uang yang diserahkan dalam kwitansi tersebut; _____
- Bahwa saksi pernah mendengar bahwa pelunasan tunggakan PSDH dan DR dalam bentuk kompensasi dua buah mobil truck Toyota Dyna dan saksi mengetahuinya setelah disampaikan oleh SAMSUL PAWEANGI secara lisan; _____
- Bahwa tunggakan PT. Duta Sulawesi Agro sudah tutup dan apabila ada tunggakan PSDH dan DR menjadi tanggung jawab perusahaan induk; _____
- Bahwa saksi bekerja di PT Duta Sulawesi Agro sejak tahun 1999 dan PT. Duta Sulawesi Agro Kendari kantornya gabung di PT. Hadji Kalla Cabang Kendari; _____
- Bahwa saksi tidak tahu apakah PT. Duta Sulawesi Agro mempunyai bank garansi; _____
- Bahwa saksi tidak mengetahui tata cara penyetoran PSDH dan DR; _____

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi kenal dengan NENENG ISKANDAR, SH., karena ia pernah membantu dalam perusahaan akan tetapi ia bukan karyawan PT. Duta Sulawesi Agro melainkan karyawan Hadji Kalla; _____
Atas keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan dan membenarkan; _____

7. IR. MUHAMMAD NASIR, MS.; _____

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan penyelewengan dana iuran PSDH dan DR; _____
- Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala Dinas (Kadis) Kehutanan Kabupaten Konawe sejak Maret 2003 sampai dengan Maret 2005 dan saat saksi menjabat sebagai Kadis Kehutanan Kabupaten Konawe, ada tunggakan PSDH dan DR perusahaan PT. Duta Sulawesi Agro berdasarkan surat Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor: 912/5723 Tanggal 31 Desember 2004 perihal pertanggungjawaban pengurusan piutang Negara atas tunggakan PSDH dan DR dan dalam surat tersebut disebutkan ada tunggakan tetapi tidak disebutkan jumlah besaran tunggakannya; _____
- Bahwa setelah saksi menerima surat dari Gubernur Sultra kemudian saksi mencari informasi melalui Sub Dinas Perencanaan an. Ir. SIRAJUDIN karena pada saat itu saksi belum lama menjabat sebagai Kadis Kehutanan, kemudian saksi laporkan kepada Bupati Konawe tentang tunggakan PSDH dan DR PT. Duta Sulawesi Agro yang merupakan anak perusahaan PT. Hadji Kalla dan atas laporan saksi, Bupati memerintahkan saksi untuk menelusuri tunggakan PSDH dan DR tersebut; _____
- Bahwa berdasarkan perintah tersebut, saksi ke PT. Hadji Kalla di Makassar dan saksi bertemu dengan stafnya an. Nana Jamil dan mengatakan bahwa PT. Duta Sulawesi Agro sudah tutup dan saksi disampaikan untuk mencari informasi pada PT. Hadji Kalla Cabang Kendari, kemudian saksi ke PT. Hadji Kalla Cabang Kendari dan bertemu dengan Neneng Iskandar dan selanjutnya saksi disampaikan bahwa PT. Duta Sulawesi Agro telah melunasi tunggakan PSDH dan DR berdasarkan kwitansi sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) yang diterima oleh terdakwa, lalu saksi menemui terdakwa dan menyampaikan tentang tunggakan PSDH dan DR PT. Duta Sulawesi Agro dan memperlihatkan bukti fotocopy kwitansi dan selanjutnya saksi buat laporan ke Bupati; _____
- Bahwa Neneng Iskandar tidak menyampaikan kepada saksi tentang kompensasi PSDH dan DR berupa 2 unit mobil truck dan saksi tahunya ada



kompensasi 2 unit mobil truck setelah saksi bertemu dengan terdakwa di rutan dan setelah itu saksi sempat telepon pak Razak (bupati pada saat itu), tetapi menurut pak razak tidak benar ada kompensasi 2 unit mobil truck; ____

- Bahwa saksi tidak memeriksa 2 unit truck yang dikatakan sebagai kompensasi tetapi sepengetahuan saksi ada 2 mobil truck pada Dinas Kehutanan Kabupaten Konawe; _____
 - Bahwa saksi tidak mengetahui tahun berapa pengadaan 2 unit mobil truck sebagaimana dalam inventaris barang dan saksi juga tidak mengetahui proses pengadaan 2 unit mobil truck tersebut pada Dinas Kehutanan Kabupaten Konawe; _____
 - Bahwa saksi tidak tahu apakah pembayaran dana PSDH dan DR dapat dikompensasi dengan barang dan saksi juga tidak tahu apakah pembayaran PSDH dan DR dapat diwakilkan kepada orang lain selain dari perusahaan tersebut; _____
 - Bahwa selain menemui terdakwa, saksi juga pernah ke KP2LN dan saksi disampaikan bahwa masalah ini pernah ke KP2LN tetapi ditarik kembali oleh Dinas Kehutanan; _____
 - Bahwa saksi tidak mengetahui apakah pembayaran PSDH dan DR sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) sebagai kwitansi dilakukan pembayaran tunai; _____
 - Bahwa saksi tidak tahu apakah pembayaran sebesar Rp. 250.000.000,- berupa kompensasi 2 unit mobil truck; _____
 - Bahwa kwitansi bukan merupakan bukti pembayaran PSDH dan DR ke rekening Menteri Kehutanan; _____
 - Bahwa saksi tidak mengetahui alasan penarikan kembali pengurusan tunggakan PSDH dan DR dari KP2LN ke Dinas Kehutanan Kabupaten Konawe; _____
- Atas keterangan yang diberikan oleh saksi, terdakwa tidak keberatan; _____

____ Menimbang, bahwa saksi **NENENG ISKANDAR, SH.**, telah dipanggil secara sah dan patut namun tetap tidak hadir dipersidangan karena saksi berada dalam rumah tahanan Negara maka atas permintaan Jaksa Penuntut Umum dan atas persetujuan terdakwa dan Penasihat Hukumnya maka keterangan saksi Neneng Iskandar dalam berita acara pemeriksaan pendahuluan dari Penyidik dibacakan yang pada pokoknya sebagai berikut: _____



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa sepengetahuan saksi memberikan keterangan sehubungan masalah penyelewengan dana pembayaran iuran PSDH dan DR pada Kantor Dinas Kehutanan Kabupaten Konawe TA 2003; _____
- Bahwa saksi bekerja pada PT. Hadji Kalla sejak Tahun 1999 dan tugas saksi sebagai *counter sales* (bagian pemasaran) dan sekarang saksi sudah keluar dari PT. Hadji Kalla; _____
- Bahwa seingat saksi bahwa pemilik PT. Duta Sulawesi Agro adalah Ibu Hj. FATIMAH KALLA dan bergerak dalam bidang usaha kelapa sawit dan setahu saksi perusahaan tersebut sudah berhenti; _____
- Bahwa seingat saksi besaran tunggakan PSDH dan DR dari surat PUPN adalah sebesar Rp. 931.114.633,23 (sembilan ratus tiga puluh satu juta seratus empat belas ribu enam ratus tiga puluh tiga rupiah dua puluh tiga sen); _____
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah sudah lunas atau belum karena yang berurusan masalah tersebut adalah pimpinan dan pihak Kehutanan Kabupaten Konawe sedangkan 2 (dua) unit mobil truck tersebut sepengetahuan saksi adalah kompensasi pembayaran tunggakan antara PT. Duta Sulawesi Agro dengan Pihak Dinas Kehutanan yang diserahkan kepada Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Konawe dalam hal ini saudara Yusuf Supriatna sejumlah Rp. 250.000.000,- (kwitansi terlampir); _____
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menyerahkan kwitansi pada waktu itu karena seingat saksi pada waktu itu Manajer Pemasaran PT. Haji Kalla almarhum H. Syamsul Paewangi yang berhubungan langsung dengan Razak Porosi selaku Bupati pada waktu itu dan Kepala Dinas Kehutanan saudara Yusuf Supriatna; _____
- Bahwa yang menerima 2 (dua) unit mobil truck pada waktu itu adalah Yusuf Supriatna dan disertai tanda terima; _____
- Bahwa sepengetahuan saksi bahwa antara PT. Hadji Kalla dan PT. Duta Sulawesi Agro mempunyai hubungan satu kepemilikan saham karena pemilik PT. Duta Sulawesi Agro dalam hal ini Hj. Fatimah adalah Dirut PT. Hadji Kalla sampai sekarang; _____

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang memerintahkan atas penyerahan 2 (dua) unit mobil truck kepada Dinas Kehutanan sebagai kompensasi pembayaran tunggakan PSDH dan DR pada PT. Duta Sulawesi Agro; _____
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa kegiatan PT. Duta Sulawesi Agro sehingga mempunyai tunggakan PSDH dan DR; _____

Atas keterangan yang dibacakan, terdakwa akan menanggapi pada pembelaan; _____

____ Menimbang, bahwa selain mengajukan para saksi tersebut diatas, Penuntut Umum juga menghadirkan satu orang Ahli yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agama ahli tersebut, dan ahli tersebut memberikan keterangan sebagai berikut: _____

- **IR. BERTHA;** _____
- Bahwa ahli ditunjuk untuk memberikan keterangan sebagai ahli berdasarkan Surat Tugas Nomor: 508.1/332/KDST Tanggal 20 Desember 2010; _____
- Bahwa jabatan ahli menjabat sebagai Kepala Seksi Bimbingan Pengelolaan Hutan, Kepala Seksi Evaluasi dan Pelaporan dan Kepala Seksi Iuran Kehutanan mulai Tahun 2008 sampai dengan sekarang; _____
- Bahwa tugas pokok ahli adalah memantau dan mendata iuran kehutanan Sulawesi Tenggara, melakukan rekonsiliasi iuran kehutanan dan melaksanakan bimbingan teknis tentang iuran kehutanan; _____
- Bahwa sepengetahuan ahli terdakwa dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan hal ada tunggakan PSDH dan DR dari PT. Duta Sulawesi Agro, perusahaan yang bergerak dibidang perkebunan kelapa sawit yang memperoleh IPK yang berlokasi di Rوتا Kecamatan Asera, Kabupaten Konawe; _____
- Bahwa Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) adalah pungutan yang dikenakan kepada pemegang izin sebagai pengganti nilai intristik dari hasil hutan yang dipungut dari hutan Negara sedangkan Dana Reboisasi (DR) adalah dana untuk reboisasi dan rehabilitasi hutan serta kegiatan pendukungnya yang dipungut dari pemegang izin usaha pemamfaatan hasil hutan dari hutan alam berupa kayu; _____

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nilai intristik dari hasil hutan yang dikenakan PSDH misalnya nilai kayu yang diperhitungkan dengan hasil hutan, PSDH dikenakan atas kayu dan non kayu termasuk madu sedangkan DR khusus kayu; _____
- Bahwa PSDH dan DR dikenakan pada saat penebangan kayu, hasil penebangan disampaikan kepada pejabat penagih untuk dihitung PSDH dan DR-nya; _____
- Bahwa perhitungan PSDH berdasarkan laporan hasil produksi yaitu volume x tarif x harga patokan (diatur dalam PP no. 59 Tahun 1998, dirubah dengan PP No. 74 Tahun 1999) sedangkan DR berdasarkan laporan hasil produksi yaitu volume x tarif (diatur dalam PP No. 92 Tahun 1999); _____
- Bahwa yang menentukan tarif PSDH dan DR adalah Menteri Perdagangan dan Tarif DR dalam bentuk dollar diatur dalam PP 35 Tahun 2002; _____
- Bahwa PSDH dan DR disetorkan sebagai penerimaan negara bukan pajak (PNPB); _____
- Bahwa cara mengetahui adanya tunggakan PSDH dan DR yaitu setiap bulan Dinas Kehutanan Propinsi memantau Dinas Kehutanan Kabupaten/ Kota dan menyampaikan laporan dan berdasarkan laporan tersebut didapatkan ada tunggakan PSDH dan DR PT. Duta Sulawesi Agro; _____
- Bahwa besar tunggakan PSDH PT. Duta Sulawesi Agro sebesar Rp. 272.698.203,95 dan DR sebesar Rp. 84.980.829,28 dan DR sebesar US \$ 114.687,12; _____
- Bahwa PT Duta Sulawei Agro beroperasi sejak Tahun 1999 dan sekarang sudah tidak beroperasi lagi; _____
- Bahwa ahli tidak mengetahui dari mana besaran tunggakan PSDH dan DR secara pasti dan saksi mengetahui besaran tersebut dari data yang diambil di Kabupaten; _____
- Bahwa ahli tidak mengetahui secara pasti sejak kapan PT. Duta Sulawesi Agro menunggak iuran PSDH dan DR dan saksi mengetahuinya sejak saksi menjabat sebagai Kepala Seksi Iuran; _____
- Bahwa terhadap perusahaan yang menunggak PSDH dan DR dikenakan sanksi yaitu teguran I, II dan III dan sanksi berupa pencabutan izin; _____
- Bahwa terhadap tunggakan PSDH dan DR tetap dilakukan penagihan; _____
- Bahwa terhadap tunggakan PSDH dan DR PT. Duta Sulawesi Agro, sepengetahuan ahli PT. Duta Sulawesi Agro telah membayar sebesar Rp. 250.000.000,- kepada terdakwa berdasarkan kwitansi tertanggal 16 Januari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2003 dan kwitansi tersebut tidak bisa dikatakan sebagai pembayaran PSDH dan DR, pembayaran PSDH dan DR dapat dikurangkan jika sudah masuk ke rekening Menteri Kehutanan; _____

- Bahwa ahli tidak mengetahui apakah ada penyelesaian dari KP2LN pada saat urusan tunggakan PT. Duta Sulawesi Agro dan saksi mengetahui penyelesaian tunggakan ditarik kembali oleh Dinas Kehutanan Kabupaten Konawe; _____
- Bahwa dapat dibenarkan urusan penyelesaian tunggakan ditarik kembali dari KP2LN jika penanggung hutang mau menyelesaikan hutangnya; _____
- Bahwa yang menyebabkan Dinas Kehutanan Kabupaten Konawe menarik kembali karena ada pernyataan dari PT. Duta Sulawesi Agro akan menyelesaikan/mengangsur hutangnya sebanyak 3 kali; _____
- Bahwa PT. Duta Sulawesi Agro melakukan pembayaran sebesar Rp. 250.000.000,- tetapi tidak disetorkan ke rekening Menteri Kehutanan tetapi melalui terdakwa; _____
- Bahwa sampai sekarang PT. Duta Sulawesi Agro sampai sekarang belum ada pembayaran; _____
- Bahwa iuran PSDH dan DR yang disetorkan tidak dapat diambil langsung oleh daerah yang menyetor dan semua setoran harus disetor dulu ke pusat dan kemudian dibagi; _____
- Bahwa penyetoran PSDH diatur dalam Keputusan Menteri 271 Tahun 1996 dan DR dalam Keputusan Menteri No. 272 Tahun 1996; _____
- Bahwa upaya Dinas Kehutanan Propinsi Sulawesi Tenggara untuk menyelesaikan tunggakan PSDH dan DR dari PT. Duta Sulawesi Agro yang diterima oleh terdakwa yaitu melalui Surat No. 361/468/KDST Tanggal 7 Agustus 2004 perihal konfirmasi pengurusan tunggakan PSDH dan DR PT. Duta Sulawesi Agro, dilanjutkan Surat No. 361/5542/ KDST Tanggal 11 September 2004 perihal penyerahan piutang Negara atas tunggakan PSDH dan DR PT. Duta Sulawesi Agro, Surat No. 361/231/KDST tanggal 24 April 2008 perihal tunggakan PSDH dan DR dan Surat No. 365/656/KDST tanggal 31 Oktober 2008 perihal tunggakan PSDH dan DR; _____
- Bahwa pembayaran PSDH dan DR tidak bisa dilakukan dalam bentuk kompensasi; _____
- Bahwa terhadap tunggakan yang telah dibayarkan berdasarkan tanda bukti kwitansi sebesar Rp. 250.000.000,- mengakibatkan ada kerugian Negara; _____



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang bertanggung jawab dalam hal tunggakan yang telah diterima adalah terdakwa sebagai orang yang menerima; _____
 - Bahwa pembagian iuran PSDH dan DR antara daerah dan pusat yaitu berdasarkan PP No. 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan sebagaimana telah diubah dengan PP No. 81 Tahun 2001 dan juga diatur dalam PP No. 55 Tahun 2005 tentang dana perimbangan yaitu PSDH Pusat 20%, Propinsi 16%, Kabupaten/Kota Penghasil 32% dan Kabupaten/Kota lainnya 32%. DR Pusat 60% dan Kabupaten Kota penghasil 40%; _____
 - Bahwa ahli tidak mengetahui apakah sebelum ada tunggakan PT Duta Sulawesi Agro membayar PSDH dan DR; _____
 - Bahwa yang bertanggung jawab terhadap pembayaran tunggakan PSDH dan DR PT. Duta Sulawesi Agro adalah pihak perusahaan; _____
 - Bahwa dasar ahli mengatakan ada kerugian Negara akibat dari pembayaran yang diterima oleh terdakwa karena adanya kwitansi pembayaran tetapi pembayaran tersebut tidak termonitor direkening Menteri Kehutanan; _____
 - Bahwa tujuan garansi bank adalah sebagai jaminan apabila ada tunggakan maka jaminan tersebut akan dicairkan sebagai pembayaran; _____
 - Bahwa ahli tidak mengetahui apakah ada garansi bank PT. Duta Sulawesi Agro; _____
- Atas keterangan ahli, terdakwa tidak keberatan; _____

_____ Menimbang, bahwa dipersidangan Penasihat Hukum terdakwa mengajukan alat bukti yang meringankan berupa: _____

1. Surat Pernyataan, yang ditandatangani oleh NENENG ISKANDAR tertanggal 5 Mei 2010, yang menyatakan bahwa dalam proses penyelesaian tunggakan PSDH-DR An. PT. DUTA SULAWESI AGRO (KALLA GROUP) pada sekitar bulan Oktober 2002 s/d bulan Januari 2003, yang dalam hal ini sdr. Ir. YUSUF SUPRIATNA (Kadis Kehutanan pada waktu itu), tidak mengetahui sepenuhnya dalam proses penyelesaian tunggakan tersebut atau terlibat langsung tetapi hanya menandatangani kwitansi sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) yang merupakan bentuk kompensasi dari pembayaran 2 unit kendaraan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



truck, yang disodorkan oleh NENENG ISKANDAR atas perintah Bapak Drs. H. RAZAK POROSI yang digunakan untuk kepentingan pertanggung jawaban internal antara PT. DUTA SULAWESI AGRO dan PT. H. KALLA (dealer Toyota) tidak digunakan sebagai bukti pembayaran PSDH-DR yang resmi (syah); _____

Adapun yang bertanggung jawab atas kebijakan tersebut sepenuhnya adalah Bapak Drs. H. Razak Porosi (Bupati Kendari) dari pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Kendari, FATIMAH KALLA, TITI ANDAYANI, HAMZAH MARU dan NENENG ISKANDAR dari Pihak PT. DUTA SULAWESI AGRO dan PT. HAJI KALLA serta Bapak SUGIANTO, SE selaku Kepala Kantor Penyelesaian Piutang dan Lelang Negara Kendari; _____

2. Surat Pernyataan, yang ditandatangani oleh ISKANDAR KAMPAY, tertanggal 13 nopember 2009, yang menyatakan sebenar-benarnya, bahwa saya kira-kira pada Bulan oktober Tahun 2002, telah mengantarkan 2 unit mobil truck Dyna Rino dengan spesifikasi: _____

1.

 Merek _____
 : TOYOTA; _____

Type : -; _____
 Jenis : TRUCK; _____
 No. Mesin : 14B-1678303; _____
 No. Chasis : NHP31B443-1003249; _____
 Warna : Merah; _____

2.

 Merek _____
 : TOYOTA; _____

Type : -; _____
 Jenis : TRUCK; _____
 No. Mesin : 14B-1709269; _____



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. Chasis : MHF01B4432000; _____

Warna : Merah; _____

____ Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penasihat Hukum Terdakwa juga menghadirkan 1 (satu) orang saksi yang meringankan terdakwa yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agama saksi tersebut, dan saksi tersebut memberikan keterangan sebagai berikut: _____

- **ISKANDAR KAMPAY;** _____
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah pengadaan kendaraan dinas pada Dinas Kehutanan Kabupaten Kendari yaitu berupa 2 (dua) unit mobil truck; _____
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan terdakwa pada saat mengantar mobil truck tersebut dan pada waktu itu saksi sebagai sopir; _____
- Bahwa yang memerintahkan saksi saat itu adalah Kepala Cabang an. Hamsah Ma'ruf dan saksi pergi bersama dengan Neneng dan Bahrur; _____
- Bahwa saksi bekerja di PT. Hadji Kalla pada bagian persuratan/bagian umum dan saksi bekerja di PT. Hadji Kalla sejak Tahun 1979 dan dipindahkan ke Kendari Tahun 1988; _____
- Bahwa saksi pernah membuat surat Pernyataan Tanggal 3 September 2009 dan saksi membuat sehubungan dengan penyerahan mobil dan saksi membuat atas permintaan Neneng dan terdakwa; _____
- Bahwa saksi baru satu kali mengantar mobil ke Dinas Kehutanan yaitu pada Tahun 2002; _____
- Bahwa saksi membawa 1 mobil truck dan yang dibawa saat itu ada 3 buah dan salah satunya adalah mobil dinas; _____
- Bahwa sepengetahuan saksi PT. Duta Sulawesi Agro bergerak dibidang kelapa sawit kantor pusatnya di Cokro Makassar; _____
- Bahwa sepengetahuan saksi PT. Duta Sulawesi Agro di Kendari berhenti pada Tahun 2002; _____
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang tunggakan PSDH dan DR PT. Duta Sulawesi Agro; _____
- Bahwa satu mobil diterima oleh isterinya Razak Porosi; _____
- Bahwa saksi tidak mengetahui tahun pembuatan mobil truck tersebut; _____



- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ada kaitannya penyerahan kendaraan dari PT. Hadji Kalla kepada Dinas Kehutanan Kabupaten Kendari dengan PT. Duta Sulawesi Agro; _____
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah penyerahan mobil tersebut merupakan pembayaran tunggakan; _____
Atas keterangan yang diberikan oleh saksi, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya; _____

____ Menimbang, bahwa selanjutnya didengar keterangan terdakwa **Ir. YUSUF SUPRIATNA, WM** yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:____

- Bahwa terdakwa dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan adanya dugaan tentang penyalahgunaan dana PSDH dan DR; _____
- Bahwa penyalahgunaan PSDH dan DR pada Tahun 2002 dan saat itu terdakwa menjabat sebagai Kepala Dinas Kehutanan Kendari yang sekarang adalah Kabupaten Konawe; _____
- Bahwa tugas dan tanggung jawab terdakwa selaku Kepala Dinas Kehutanan adalah melaksanakan urusan rumah tangga bupati dibidang kehutanan, melaksanakan pengawasan hutan dan kehutanan di wilayah Kabupaten Kendari (sekarang Kabupaten Konawe), melaksanakan penataan hutan, reboisasi dan juga pemamfaatan hutan, melaksanakan perintah bupati baik lisan maupun tertulis; _____
- Bahwa Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) adalah suatu pungutan yang dikenakan kepada pemegang izin sebagai pengganti nilai intrinsic dari hasil hutan yang dipungut dari hutan Negara. Sedangkan Dana Reboisasi (DR) adalah dana untuk reboisasi dan rehabilitasi hutan serta kegiatan pendukungnya yang dipungut dari pemegang izin usaha pemamfaatan hasil hutan dari hutan alam berupa kayu; _____
- Bahwa yang mempunyai kewajiban untuk menyetor PSDH dan DR adalah perusahaan yang bergerak dibidang eksploitasi hutan melalui HPH atau pemegang izin lainnya (IPK) langsung disetor ke rekening Menteri Kehutanan melalui Bank Mandiri; _____
- Bahwa mekanisme pembayaran PSDH dan DR adalah dengan pola *self assesment* yaitu menghitung sendiri jumlah PSDH dalam bentuk rupiah dan DR dalam bentuk US dollar, yang mana sebelumnya Dinas Kehutanan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan data volume kayu sesuai laporan hasil produksi selanjutnya setelah dihitung oleh perusahaan sendiri kewajiban disetor langsung ke rekening Menteri Kehutanan melalui Bank Mandiri; _____

- Bahwa ketentuan besaran penetapan PSDH dan DR diatur bersama oleh Menteri Kehutanan dan Menteri Perdagangan sesuai fluktuasi nilai dolar dan diubah setiap 3 bulan sekali; _____
- Bahwa iuran PSDH dan DR dikenakan pada seluruh pemegang izin HPH, IPK dan pemegang izin lainnya kecuali kayu yang ditanam sendiri oleh masyarakat hanya dikenakan pembayaran retribusi; _____
- Bahwa pada Tahun 2003 ada perusahaan pemegang izin yang tidak menyetor dana PSDH dan DR yaitu PT. Duta Sulawesi Agro pemegang izin pemamfaatan kayu (IPK) dalam rangka pembukaan hutan untuk tanaman kelapa sawit di Kecamatan Routa, Kabupaten Kendari (Kabupaten Konawe) ;
- Bahwa pada saat perusahaan yang diberikan izin harus ada jaminan yang diberikan berupa garansi bank namun terhadap PT. Duta Sulawesi Agro terdakwa tidak mengetahui ada bank garansi yang diberikan atau tidak; _____
- Bahwa pada saat terdakwa menjabat sebagai Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Kendari/Kabupaten Konawe PT. Duta Sulawesi Agro masih beroperasi dan saat itu masih pembersihan lokasi; _____
- Bahwa terhadap PT. Duta Sulawesi Agro, Dinas Kehutanan dalam menentukan PSDH dan DR dengan cara menghitung tunggakan-tunggakan pohon yang sudah ditebang dan PT Duta Sulawsi Agro pernah melakukan pembayaran PSDH dan DR dengan asas self assessment dan pembayaran dilakukan sebelum terdakwa menjadi Kepala Dinas dan terdakwa mengetahui berdasarkan tanda setoran pada Bank Mandiri ; _____
- Bahwa sepengetahuan terdakwa PT. Duta Sulawesi Agro pemiliknya adalah Ibu FATIMA KALLA dan PT. Duta Sulawesi Agro adalah anak perusahaan PT Hadji Kalla yang berkantor di jalan Cokroaminoto Makassar dan kantornya di Kendari adalah Kantor Cabang PT Hadji Kalla; _____
- Bahwa terdakwa pernah ke kantor PT Duta Sulawesi Agro di Makassar untuk mengkonfirmasi masalah di Routa dan bertemu dengan ibu FATIMA KALLA dan setelah bertemu tidak ada tindak lanjut yang dilakukan oleh PT. Duta Sulawesi Agro; _____

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa tunggakan PSDH dan DR PT. Duta Sulawesi Agro sekitar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) dan terdakwa sudah lupa jumlah pastinya dan setiap tunggakan dikenakan bunga sebesar 2% pokok perbulannya; _____
- Bahwa setelah terdakwa bertemu dengan Ibu FATIMA KALLA dan tidak ada tindak lanjut penyelesaian tunggakan PSDH dan DR, kemudian terdakwa memberikan surat teguran sebanyak 3 kali dan setelah tiga kali diberikan teguran juga tidak ada tindak lanjut, lalu terdakwa menyerahkan penyelesaian tunggakan PSDH dan DR ke KP2LN tanggal 28 Maret 2002; _____
- Bahwa setelah dilimpahkan ke KP2LN tunggakan PT Duta Sulawesi Agro sekitar satu milyar lebih dan PT Duta Sulawesi Agro keberatan mengenai besaran bunganya kemudian dilakukan perhitungan ulang sehingga sisa tunggakan atas PSDH dan DR PT Duta Sulawesi Agro sebesar Rp. 561.859.923,24; _____
- Bahwa berdasarkan laporan hasil verifikasi yang dilakukan KP2LN maka jumlah hutang PT. Duta Sulawesi Agro sebesar Rp. 618.045.930,95; _____
- Bahwa setelah penyerahan penyelesaian piutang pada KP2LN, terdakwa pernah melakukan pengecekan ke KP2LN dan pada saat itu tahapan penyelesaian pada tahap pemanggilan dan beberapa lama kemudian terdakwa mengecek kembali dan Kepala Kantor KP2LN saat itu yaitu Sugianto mengatakan bahwa karena masalah ini mau diselesaikan H. Kalla, maka bapak harus tarik berkasnya lalu terdakwa melakukan penarikan; _____
- Bahwa setelah melakukan penarikan berkas lalu pada Bulan Januari 2003 terdakwa didatangi oleh Neneng Iskandar dalam hal meminta terdakwa menandatangani kwitansi setelah 3 bulan terdakwa menerima dua unit truck Toyota Dyna; _____
- Bahwa pada saat Neneng Iskandar menyodorkan kwitansi yang akan terdakwa tanda tangani tidak ada redaksinya dalam kwitansi dan hanya tertulis jumlah uang sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah); _____
- Bahwa terdakwa mengetahui redaksinya dalam kwitansi pada Tahun 2005 setelah terdakwa non job dan menerima surat dari Bupati Tony Herbiansyah dan kemudian terdakwa mengkonfirmasi kepada Pak Tony kalau pemasalahannya tidak demikian dan setelah itu terdakwa berpikir masalah ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah selesai dan pada Tahun 2008 terdakwa mendapat panggilan dari Kejati Sulawesi Tenggara; _____

- Bahwa terdakwa tidak mengetahui siapa yang menyerahkan 2 unit mobil truck apakah Hadji Kalla Group atau PT Duta Sulawesi Agro, terdakwa tidak jelas; _____
- Bahwa penandatanganan kwitansi terdakwa tidak mendapat keuntungan dan terdakwa menandatangani kwitansi karena adanya pemberitahuan bahwa kwitansi ini sebagai urusan intern Hadji Kalla dengan PT. Duta Sulawesi Agro dan tidak ada kaitannya dengan PSDH dan DR; _____
- Bahwa mengenai kwitansi Rp. 44.500.000,- terdakwa tidak mengetahui dan terdakwa mengetahui pada saat penyidikan bahwa kwitansi tersebut untuk biaya administrasi pada Kantor Piutang dan Lelang Negara Cabang Kendari untuk penyelesaian piutang PT. Duta Sulawesi Agro; _____
- Bahwa tunggakan PSDH dan DR dikatan telah dibayar apabila si pengusaha sudah mempunyai bukti transfer telah masuk ke rekening Menteri Kehutanan; _____
- Bahwa terdakwa menandatangani Kwitansi Rp. 250.000.000,- dikantor Dinas Kehutanan Kabupaten Kendari dan terdakwa menanyakan kepada Neneng Iskandar pada tahap penyidikan 'Kenapa kwitansi tersebut menjadi berkembang seperti itu dan Neneng menjawab " saya juga tidak tahu, Tanya saja Ibu Titi lalu terdakwa menemui Ibu Titi di Makassar dan mengatakan tolong bantu saya tanda tangani kwitansi tersebut bahwa saya tidak menerima uang sebesar Rp. 250.000.000,- tersebut; _____
- Bahwa terdakwa tidak menerima uang atas pembayaran sebagaimana dalam kwitansi dan seingat terdakwa penarikan dulu dilakukan baru terdakwa menandatangani kwitansi; _____

____ _ Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim menunjuk segala sesuatu yang terurai dalam Berita Acara Persidangan yang mempunyai relevansi secara keseluruhan dianggap ikut termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini; _____

____ _ Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa, bukti surat serta barang bukti dihubungkan dengan satu sama lain yang saling bersesuaian, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut : _____



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Ir. Yusuf Supriatna WM pada Tahun 2001 menjabat sebagai Wakil Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Kendari, kemudian diangkat sebagai Pj. Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Kendari berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kendari, Nomor:296 Tahun 2001 yang ditetapkan di Unaaha pada Tanggal 19 – 5 – 2001, cap tandatangan Bupati Kendari Drs. H. Razak Porosi dan tidak lama kemudian terdakwa definitif menjadi Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Konawe; _____
- Bahwa pada Tahun 1999 PT. Duta Sulawesi Agro mempunyai IPK No. 45/Kpts/Kwl-3/VI/1999 di Desa Rauta RPH Wiwirano BKPH Laiwoi Kabupaten Kendari; _____
- Bahwa PT. Duta Sulawesi Agro merupakan anak perusahaan PT. Hadji Kalla yang awalnya bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit yang wilayah operasionalnya di Kecamatan Rauta dan oleh karena lokasi perkebunan masih hutan maka dibersihkan terlebih dahulu sehingga ada kegiatan penebangan kayu dengan Izin Pemamfaatan Kayu (IPK); _____
- Bahwa PT Duta Sulawesi Agro sudah tutup sejak Tahun 2002 dan perkebunan kelapa sawit tidak jadi dimanfaatkan; _____
- Bahwa selama PT. Duta Sulawesi Agro melakukan kegiatan produksi pemanfaatan kayu maka setiap hasil produksinya di kenakan iuran Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan iuran Dana Reboisasi (DR) sebagaimana ditetapkan sesuai PP No. 51 Tahun 1988 tentang PSDH dan Kepres No. 30 Tahun 1990 tentang Penyetoran, Pemungutan dan Pembayaran IHH; _____
- Bahwa tata cara pengenaan iuran PSDH dan DR yaitu setelah perusahaan pemegang izin melakukan kegiatan penebangan dan hasil tebangan tersebut dibuatkan Laporan Hasil Produksi (LHP) setiap 10 (sepuluh) hari atau dalam satu bulan sebanyak 3 (tiga) priode dan hasil LHP tersebut diajukan kepada pejabat pengesah LHP untuk mendapatkan pengesahaan kemudian LHP tersebut diajukan untuk diterbitkan SPP/SPM oleh pejabat penagih lalu atas dasar SPM tersebut perusahaan wajib menyetor PSDH dan DR ke kas Negara melalui rekening Bendahara Penerima Departemen Kehutanan; _____
- Bahwa tata cara perhitungan PSDH yaitu berdasarkan LHP maka volume produksi dikalikan dengan tarif dan harga patokan sedangkan DR berdasarkan LHP maka volume dikalikan dengan tarif; _____

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menentukan besaran tarif PSDH dan DR adalah Menteri Perdagangan; _____
- Bahwa oleh karena PT. Duta Sulawesi Agro selama melakukan produksi pemanfaatan kayu di Kecamatan Rauta yang merupakan wilayah Kabupaten Kendari maka perhitungan PSDH dan DR dilakukan oleh pejabat pada Dinas Kehutanan Kabupaten Kendari; _____
- Bahwa berdasarkan perhitungan pejabat Pengesahan Laporan Hasil Produksi ternyata PT. Duta Sulawesi Agro tidak melakukan pembayaran iuran PSDH dan DR sebagaimana dalam SPT – HPH Tahun anggaran 1999/2000 sehingga terjadi tunggakan pembayaran PSDH dan DR; _____
- Bahwa atas tunggakan pembayaran PSDH dan DR, pihak PT Duta Sulawesi Agro (Kalla Group) membuat SURAT PERNYATAAN, tanggal 23 Januari 2001 yang ditandatangani SUBUKI SOKONG, Jabatan Manager Produksi dan Pemasaran PT. Duta Sulawesi Agro yang pada pokoknya menyatakan bersedia dan sanggup melunasi tunggakan PSDH dan DR sesuai SPT HPH (IPK) Tahun 1999/2000 secara bertahap sebanyak 3 kali angsuran dengan jumlah PSDH/IHH sebesar Rp. 223.218.910, 43 dan DR sebesar Rp. 69.561.614,75 dan US\$ 93,877.89 sebagaimana lampiran Surat Pernyataan yaitu Rencana Pelunasan Pembayaran PSDH. DR TA. 2001 an. PT. Duta Sulawesi Agro yang ditandatangani tanggal 24 Januari 2001 dan diketahui oleh Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Kendari Ir. Yusuf Supriatna WM (terdakwa); _____
- Bahwa PT. Duta Sulawesi Agro pada kenyataannya tidak menyelesaikan tunggakan PSDH dan DR sebagaimana dalam surat pernyataannya maka selanjutnya Dinas Kehutanan Kabupaten Kendari melakukan penagihan pembayaran tunggakan PSDH dan DR melalui Surat Nomor: 973/450/Dk-KDI/2000 tanggal 25 Januari 2001 yang ditujukan kepada Pimpinan PT. Duta Sulawesi Agro di Makassar yang ditandatangani oleh Plt. Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Kendari Ir. Yusuf Supriatna WM, Nip. 080018609 ; _
- Bahwa setelah mengirimkan surat penagihan, ternyata PT. Duta Sulawesi Agro belum juga melakukan pembayaran PSDH dan DR sebagaimana dalam surat pernyataannya maka selanjutnya Dinas Kehutanan Kabupaten Kendari memberikan Peringatan I melalui Surat No:973/556.A/DK.KDI/2001, tanggal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30 Maret 2001, perihal peringatan I yang ditandatangani oleh Ir. Yusuf Supriatna WM (terdakwa) selaku Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Kendari dan kemudian disusul dengan peringatan II dengan Surat Nomor: 973/233/DK.KDI/2001, tanggal 9 Oktober 2001, perihal peringatan II dan selanjutnya peringatan III dengan surat Nomor: 973/2924.A/Dk.KDI/XII/2001, tanggal 21 Desember 2001, perihal peringatan III yang ditandatangani oleh terdakwa selaku Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Kendari; _____

- Bahwa setelah dilakukan penagihan, peringatan I, peringatan II dan peringatan III ternyata PT. Duta Sulawesi Agro belum juga melakukan penyelesaian tunggakan iuran PSDH dan DR sehingga terdakwa selaku Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Kendari menyerahkan penyelesaian tunggakan tersebut kepada Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara Kendari dengan surat Nomor: 973/580/DK-KDI/2002, perihal Penyerahan urusan Piutang Negara, tertanggal 28 Maret 2002, dengan perincian hutang dalam lampiran surat penyerahan pengurusan piutang Negara yaitu: _____
- Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH): _____
- Pokok Hutang : Rp. 186.779.591,75; _____
- Bunga (%) : $46\% \times \text{Rp. } 186.779.591,75 = \text{Rp. } 85.918.612,20$; _____
- Dana Reboisasi (DR) : _____
- Pokok Hutang : Rp. 58.206.047,45 ; _____
: US \$ 78,552.82; _____
- Bunga (%) : $46\% \times \text{Rp. } 58.206.047,45 = \text{Rp. } 26.774.781,83$; _____
: $46\% \times \text{US } \$ 78,552.82 = \text{US } \$ 36.134,30$; _____
- Bahwa setelah menerima penyerahan masalah piutang tersebut selanjutnya pihak KP2LN melakukan penelitian berkas Nomor: RHPK-21/WPL.08/KP/0402/2002 tanggal 02 Juni 2002 tentang Piutang Negara PT. Duta Sulawesi Agro, kemudian diterbitkan Surat Penerimaan Pengurusan Piutang Negara (SP3N) Nomor: 20/PUNPC.25/2002 Tanggal 3 Juni 2002; _____
- Bahwa setelah dilakukan penelitian kasus selanjutnya pihak Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara (KP2LN) Kendari memanggil pihak PT. Duta Sulawesi Agro berdasarkan surat Nomor: PG-20/WPL.08/KP.04/2002, tanggal 03 Juni 2002, perihal panggilan yang ditandatangani oleh Sugiyanto, SE., M.Si., selaku Kepala Kantor KP2LN Kendari agar pihak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PT. Duta Sulawesi Agro datang ke KP2LN Kendari untuk mempertanggungjawabkan penyelesaian piutang Negeranya; _____

- Bahwa atas surat tersebut pihak PT. Duta Sulawesi Agro dan selanjutnya KP2LN Kendari melakukan pemanggilan terakhir pada pihak PT Duta Sulawesi Agro berdasarkan surat Nomor: PT-21/WPL.08/KP.04/2002, tanggal 06 September 2002, perihal panggilan terakhir untuk mempertanggungjawabkan penyelesaian hutang PT. Duta Sulawesi Agro, yang ditandatangani oleh Sugiyanto, SE selaku kepala kantor KP2LN Kendari; _____
- Bahwa setelah PT. Duta Sulawesi Agro tidak memenuhi surat panggilan dari KP2LN, selanjutnya Panitia Urusan Piutang Negara Cabang Sulawesi Tenggara mengeluarkan Keputusan Panitia Urusan Piutang Negara Cabang Sulawesi Tenggara Nomor: PJPNC-45/PUPNC.25/2002 tentang Penetapan Jumlah Piutang Negara atas nama PT. Duta Sulawesi Agro yang memutuskan jumlah piutang Negara yang wajib dilunasi/diselesaikan oleh PT Duta Sulawesi Agro Kendari kepada Negara cq. Dinas Kehutanan Kab. Kendari adalah sebesar Rp. 1.024.226.096, 55 (satu milyar dua puluh empat juta dua ratus dua puluh enam ribu sembilan puluh enam rupiah 55/100) dengan rincian Hutang pokok sebesar Rp. 637.749.739,20., bunga sebesar Rp. 293.364.896,03 dan biaya administrasi pengurusan piutang Negara 10% sebesar Rp. 93.111.463,32; _____
- Bahwa pihak Dinas Kehutanan Kabupaten Kendari menyampaikan kepada Kepala Kantor Piutang Negara dan Lelang Negara Kendari tentang koreksi Piutang PT. Duta Sulawesi Agro berdasarkan Surat Nomor: 973/1813/DK-KDI/02, tanggal 7 Oktober 2002 yang ditandatangani oleh Ir. Yusuf Supriatna WM selaku Kepala Dinas Kehutanan yang menyampaikan sebelumnya tunggakan PSDH dan DR PT. Duta Sulawesi Agro sebesar Rp. 931.114.633 dan setelah dilakukan pengecekan berkas setoran tunggakan PSDH dan DR PT. Duta Sulawesi Agro sebesar Rp. 445.577.929; _____
- Bahwa atas koreksi tersebut, Kantor KP2LN menyampaikan bahwa atas koreksi hutang PT. Duta Sulawesi Agro harus dilampirkan bukti-bukti pembayaran yang tidak tercatat atau bukti-bukti kesalahan perhitungan melalui Surat Nomor: S-37/WPL.08/KP.04/2003, tanggal 17 Januari 2003



yang ditandatangani oleh Kepala Kantor, Sugiyanto, S.E; _____

- Bahwa atas penyampaian tersebut, Dinas Kehutanan Kabupaten Kendari kembali melakukan koreksi piutang PT. Duta Sulawesi Agro kepada Kepala Kantor Urusan Pelayanan Piutang dan Lelang Negara (KP2LN) Kendari dengan surat Nomor: 973/1813/DK-KDI/2002, tertanggal 30 Oktober 2002 yang ditandatangani oleh Ir. Yusuf Supriatna WM selaku Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Kendari yang menyampaikan tagihan hutang PT. Duta Sulawesi Agro atas PDH dan DR sejumlah Rp. 931.114.633,23 dengan perincian PSDH (hutang pokok + bunga denda) Rp. 357.679.033,23., perincian DR (hutang pokok + bunga denda) Rp. 573.435.600,00 dan setelah dilakukan pemeriksaan berkas setoran, pihak PT. Duta Sulawesi Agro telah melakukan penyetoran sebesar Rp. 369.254.696. dengan perincian Penyetoran PSDH Rp. 120.300.051,00 dan Penyetoran DR Rp. 248.954.696,00 sebagaimana bukti setor terlampir. Dengan demikian sisa tunggakan PT. Duta Sulawesi Agro atas PSDH dan DR sebesar Rp. 561.859.923,24 yang terdiri PSDH (hutang pokok + bunga denda) sebesar Rp. 152.398.152,96 dan DR (hutang pokok + bunga denda) sebesar Rp. 409.461.770,28; _____
- Bahwa atas koreksi dari Dinas Kehutanan Kabupaten Kendari, KP2LN melakukan verifikasi dan selanjutnya Panitia Urusan Piutang Negara Cabang Sulawesi Tenggara memberitahukan kepada PT. Duta Sulawesi Agro melalui Surat Nomor: SKPBN-01/PUPNC.25/2003, hal Pemberitahuan Koreksi/Perubahan Besaran Piutang Negara sebesar Rp. 618.045.930,95 termasuk biaya administrasi pengurusan piutang Negara 10%; _____
- Bahwa PT. Duta Sulawesi Agro belum melakukan pembayaran namun kemudian dari Dinas Kehutanan Kabupaten Kendari (Konawe) melakukan penarikan piutang dengan surat Nomor: 973/182/DK-Kdi.2003, tanggal 04 Februari 2003, perihal Penarikan Urusan Piutang PT. Duta Sulawesi Agro yang ditandatangani oleh Ir. Yusuf Supriatna. WM (terdakwa); _____
- Bahwa sehubungan dengan Surat Penarikan tersebut, selanjutnya Panitia Urusan Piutang Negara Cabang Sulawesi Tenggara menyampaikan persetujuan penarikan pengurusan piutang Negara dengan Surat Nomor: S-13/PUPNC.25/ 2003, tanggal 18 Maret 2003 yang ditujukan kepada Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Kendari dengan ketentuan Biaya Administrasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengurusan Piutang Negara (Biad PPN) yang harus diselesaikan sebesar Rp. 2,5% x Rp. 561.859.923,24 = Rp. 14.046.491,00 ; _____

- Bahwa berdasarkan tanda Setoran Bank Rakyat Indonesia, PT. Duta Sulawesi Agro Kendari/Dinas Kehut. Unaaha telah menyetorkan jumlah uang sebesar Rp. 14.050.000,- ke Rek. Bend. Penerima KP2LN Kdi, No. Rek. 31.01.3437.8; _____
- Bahwa berdasarkan Lampiran Nota Dinas Nomor: ND-37/WPL.08/KP.04.05/2003 Tanggal 18 Maret 2003, Laporan Hasil Verifikasi yang ditandatangani Kepala Seksi Informasi dan Hukum Widiyanto disimpulkan dapat diterbitkan SPPNS; _____
- Bahwa Panitia Urusan Piutang Negara Cabang Sulawesi Tenggara menyampaikan kepada PT. Duta Sulawesi Agro Cabang Kendari, perihal Pernyataan Pengurusan Piutang Negara Selesai melalui Surat Nomor: SPPNS-12/PUPNC.25/2003 tanggal 18 Maret 2003 yang menyampaikan Pengurusan Piutang Negara atas nama PT. Duta Sulawesi Agro Cab. Kendari telah selesai, untuk selanjutnya pengurusan piutang Negara kembali dilakukan oleh Dinas Kehutanan Kabupaten Kendari; _____
- Bahwa sehubungan dengan penarikan tersebut, terdakwa Ir. Yusuf Supriatna. WM selaku Kepala Dinas Kehutanan Kab. Kendari menandatangani kwitansi tertanggal 16 Januari 2003 yang menyatakan sudah diterima dari PT. Duta Sulawesi Agro sejumlah uang sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) buat pembayaran pelunasan Tunggakan PSDH dan DR PT. Duta Sulawesi Agro; _____
- Bahwa yang menyodorkan kwitansi adalah NENENG ISKANDAR sebagai tanda terima sehubungan dengan penyerahan 2 unit mobil truck oleh PT. Haji Kalla dan kwitansi yang ditandatangani oleh terdakwa sebagai bukti pertanggungjawaban internal lingkup perusahaan PT. Hadji Kalla dengan PT. Duta Sulawesi Agro dalam lingkup Kalla Group; _____
- Bahwa terdakwa tidak menerima uang sebesar Rp. 250.000.000,- melainkan dikompensasikan dengan 2 unit mobil truck Toyota Dyna yang digunakan oleh Dinas Kehutanan Kabupaten Kendari; _____
- Bahwa atas surat-surat 2 unit mobil truck Toyota Dyna sehubungan dengan kompensasi pelunasan tunggakan PSDH dan DR terdakwa tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengetahuinya karena sejak bulan 3 Tahun 2003 terdakwa sudah tidak menjabat sebagai Kepala Dinas Kehutanan Kab. Kendari; _____

- Bahwa dalam rekonsiliasi Departemen Kehutanan diperoleh data bahwa penyelesaian iuran PSDH dan DR PT. Duta Sulawesi Agro belum termonitor penyelesaian setorannya sedangkan proses penyelesaiannya telah ditarik dari KP2LN kembali ke Departemen Kehutanan Kabupaten Kendari; _____
- Bahwa atas dasar Surat Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tenggara No. 361/542/KDST tanggal 11 September 2004 tentang Penanganan Pengurusan Piutang Negara atas Tunggakan PSDH dan DR selanjutnya Gubernur Sulawesi Tenggara menindaklanjuti surat tersebut dengan menyampaikan kepada Bupati Konawe dahulu Kabupaten Kendari sehubungan pertanggungjawaban Pengurusan Piutang Negara atas tunggakan PSDH dan DR dengan surat Nomor: 912/5723 tanggal 31 Desember 2004 Cap tandatangan ALI MASI, SH.; _____
- Bahwa atas surat Gubernur tersebut, selanjutnya Bupati Konawe telah memerintahkan Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Konawe, Ir. Muhammad Nasir, MS berdasarkan Surat Perintah Tugas No. 800/202 Tanggal 12 Februari 2005 untuk melakukan klarifikasi atas proses penyelesaian tunggakan PSDH dan DR sekaligus mengambil copy dokumen pembayaran dari Pihak PT. Duta Sulawesi Agro; _____
- Bahwa atas surat perintah tugas tersebut selanjutnya Ir. Muhammad Nassir mengirimkan surat kepada PT. Duta Sulawesi Agro dengan surat Nomor: 973/378/2008 perihal Tunggakan PSDH dan DR PT. Duta Sulawesi Agro, tanggal 17 Februari 2005 dan selanjutnya Ir. Muhammad Nasir ke Makassar dan bertemu dengan Nana Jamil yang mengatakan kepada Ir. Muhammad Nasir bahwa PT. Duta Sulawesi Agro telah tutup dan disampaikan kepada Muhammad Nasir agar mencari informasi pada PT Hadji Kalla Cabang Kendari dan di PT. Hadji Kalla Cabang Kendari, Ir. Muhammad Nasir bertemu dengan Neneng Iskandar dan Neneng Iskandar menyampaikan kepada Ir. Muhammad Nasir bahwa PT. Duta Sulawesi Agro telah melunasi tunggakan PSDH dan DR berdasarkan kwitansi sebesar Rp. 250.000.000,- yang diterima oleh terdakwa dan selanjutnya Ir. Muhammad Nasir menemui terdakwa dan terdakwa menyampaikan adanya kompensasi 2 unit mobil truck atas pelunasan PSDH dan DR PT. Duta Sulawesi Agro; _____



- Bahwa atas investigasi yang dilakukan oleh Ir. Muhamad Nasir selanjutnya terdakwa menyampaikan kepada Bupati Konawe mengenai pertanggungjawaban Perngurusan Piutang Negara atas Tunggakan PSDH dan DR dengan surat Nomor: 973/857/2055, tanggal 4 April 2005, dimana salah satu laporannya yaitu terhadap realisasi penyelesaian piutang Negara PT. Duta Sulawesi Agro ternyata telah dilunasi oleh perusahaan tersebut dan diterima oleh Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Kendari Ir. Yusuf Supriatna WM sebanyak Rp. 250.000.000,- dengan menlampirkan copy kwitansi tanggal 16 januari 2003; _____
- Bahwa atas laporan tersebut, selanjutnya Plt. Bupati Konawe, Drs. H. Tony Herbiansyah, M.Si mengirimkan surat kepada terdakwa sehubungan dengan copy kwitansi yang ditandatangani oleh terdakwa dengan nomor surat 542/696, tanggal 20 April 2006; _____
- Bahwa atas surat tersebut terdakwa memberikan jawaban dengan surat tanggal 28 April 2006 sebagaimana disebutkan dalam surat bupati konawe tanggal 22 Mei 2006, Nomor: 900/973, perihal setoran PSDH dan DR PT. Duta Sulawesi Agro yang ditujukan kepada terdakwa dengan penyampaian agar terdakwa segera menyetor dana PSDH dan DR yang terdakwa terima ke rekening Menteri Kehutanan; _____
- Bahwa oleh karena tidak ada penyelesaian dari terdakwa, selanjutnya Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Sulawesi Tenggara mengirmkan surat kepada Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Konawe dengan surat Nomor: 361/231/KDST, tanggal 24 April 2008 perihal tunggakan PSDH dan DR yang ditandatangani oleh Ir. H. AMAL JAYA; _____
- Bahwa atas surat tersebut, selanjutnya Bupati Konawe mengirimkan kembali surat kepada terdakwa sehubungan dengan tunggakan PSDH dan DR dengan Surat Nomor 522/481., tertanggal 4 juni 2008 yang ditandatangani oleh DR. H.LUKMAN ABUNAWAS, SH., M.Si. yang mengharapkan agar terdakwa segera menyetor dana PSDH dan DR yang terdakwa telah terima; _____
- Bahwa oleh karena terdakwa tidak menyetor dana ke rekening Menteri Kehutanan sehubungan dengan kwitansi tertanggal 16 Januari 2003 yang menyebutkan telah diterima dari PT. Duta Sulawesi Agro uang sebesar Rp. 250.000.000,- buat pembayaran pelunasan tunggakan PSDH dan DR PT. Duta Sulawesi Agro, maka terdakwa selanjutnya diproses hukum lebih lanjut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara dengan dugaan melakukan tindak pidana korupsi; _____

____ _ Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pidana yang didakwakan kepadanya dan apakah fakta hukum tersebut dapat dipakai sebagai dasar untuk menyatakan terbukti atau tidak terbukti perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa; _____

____ _ Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke muka persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas yaitu : _____

Primair --- :-Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang RI. Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI. Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; _____

Subsidair--:-Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang RI. Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI. Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; _____

____ _ Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara subsidairitas (primair – subsidair), maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan primair terlebih dahulu yaitu Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang RI. Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI. Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang unsur-unsurnya sebagai berikut: _____

•---*Setiap orang*; _____

•---*Secara melawan hukum*; _____



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

•---*Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi*; _____

•---*Dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara*; _____

____ _ Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur dalam dakwaan primair Penuntut Umum sebagai berikut: _____

Unsur: *Setiap orang*; _____

____ _ Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang menurut Pasal 2 Ayat (1) jo. Pasal 1 Angka 3, UU Nomor 31 Tahun 1999 adalah orang perseorangan atau korporasi dalam hal ini adalah yang telah melakukan tindak pidana dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan perbuatan pidana yang ia lakukan; _____

____ _ Menimbang, bahwa orang yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah terdakwa **Ir. YUSUF SUPRIATNA WM.**, yang identitas lengkapnya telah diperiksa di depan persidangan dan dibenarkan oleh terdakwa dan menurut pengamatan Majelis Hakim selama proses persidangan berlangsung terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, Jaksa Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa dan mampu menanggapi keterangan-keterangan saksi-saksi sehingga Majelis berpendapat terdakwa cakap dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan perbuatan yang didakwakan. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur *setiap orang* telah terpenuhi dengan sempurna, namun apakah terdakwa dapat dipidana berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum atau tidak, hal itu akan dibuktikan dengan unsur-unsur lainnya dalam surat dakwaan primair ini; _____

Unsur : *Secara melawan hukum*; _____

____ _ Menimbang, bahwa melawan hukum mempunyai banyak pengertian antara lain bertentangan dengan kepentingan orang lain, bertentangan dengan hak subyektif orang lain, bertentangan dengan undang-undang, bertentangan dengan hukum tidak tertulis, tanpa wewenang dan dalam hukum pidana dikenal dua jenis teori/ajaran tentang sifat melawan hukum yaitu sifat melawan hukum formil dan sifat melawan hukum materil; _____



___ _ Menimbang, bahwa menurut teori sifat melawan hukum formil dalam konteks hukum pidana dikatakan suatu perbuatan bersifat melawan hukum apabila perbuatan itu diancam pidana dan dirumuskan sebagai suatu delik dalam undang-undang. Dasar untuk menentukan patut tidaknya suatu perbuatan itu dipidana hanyalah undang-undang dan letak melawan hukumnya suatu perbuatan dilihat dari sifat melanggarnya perbuatan tersebut terhadap undang-undang; _____

___ _ Menimbang, bahwa dalam teori sifat melawan hukum formil juga terkandung pemahaman bahwa hal yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan hanyalah undang-undang. Hapusnya sifat melawan hukum formil hanya dapat dilakukan melalui proses pencabutan oleh undang-undang tidak karena nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat; _____

___ _ Menimbang, bahwa menurut teori-teori hukum pidana, sifat melawan hukum materiil terbagi dua jenis teori yaitu teori sifat melawan hukum materiil dalam fungsinya yang negatif dan teori sifat melawan hukum materiil dalam fungsinya yang positif; _____

___ _ Menimbang, bahwa teori sifat melawan hukum materiil dalam fungsinya yang negatif memberikan pandangan bahwa hal-hal atau nilai-nilai yang berada diluar undang-undang hanya diakui kemungkinannya sebagai hal yang dapat menghapus atau menegatifkan sifat melawan hukumnya perbuatan yang memenuhi rumusan undang-undang. Dengan demikian suatu perbuatan yang secara formal dirumuskan dalam undang-undang dapat hapus atau hilang sifat melawan hukumnya karena nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat; _____

___ _ Menimbang, bahwa teori sifat melawan hukum materiil dalam fungsinya yang positif memberikan pandangan bahwa suatu perbuatan dianggap sebagai suatu delik atau tindak pidana sekalipun perbuatan tersebut tidak secara eksplisit dirumuskan dan diancam dengan pidana dalam undang-undang, apabila perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum atau nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat sebagai sumber hukum positif; _____

___ _ Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum dalam penjelasan Pasal 2 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mencakup melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil yaitu meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena



tidak sesuai dengan rasa keadilan dalam masyarakat maka perbuatan tersebut dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum dan dapat dipidana; _____

___ _ Menimbang, bahwa MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA dalam Putusannya No.: 003/PUU-IV/2006, Tanggal 25 Juli 2006 yang memutuskan bahwa “pengertian melawan hukum materiel” yang diterapkan secara positif berdasarkan penjelasan Pasal 2 UUPTPK “tidak mengikat” karena maksudnya bertentangan dengan asas legalitas; _____

___ _ Menimbang, bahwa dengan putusan Mahkamah Kontitusi yang menyatakan pengertian melawan hukum materiel yang diterapkan secara positif dalam Penjelasan Pasal 2 UUPTPK tidak mengikat, maka maksud melawan hukum dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 hanya mencakup melawan hukum dalam arti formil dan melawan hukum materiel yang diterapkan secara negatif; _____

___ _ Menimbang, bahwa berdasarkan teori/ajaran sifat melawan hukum formiil dan ajaran sifat melawan hukum materiel dan penjelasan Pasal 2 UUPTK, Majelis Hakim berpendapat seseorang dikatakan melawan hukum bila apa yang dilakukan/tidak dilakukan secara tegas dilarang/diharuskan oleh undang-undang; _____

___ _ Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan terdakwa dan keterangan ahli dan bukti surat dipersidangan diperoleh fakta sebagai berikut: _____

- Bahwa pada awalnya Terdakwa **Ir. Yusuf Supriatna WM** pada Tahun 2001 menjabat sebagai Wakil Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Kendari, kemudian diangkat sebagai Pj. Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Kendari berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kendari, Nomor: 296 Tahun 2001 yang ditetapkan di Unaaha pada Tanggal 19 – 5 – 2001 dan terdakwa berdasarkan SPT – HPH Tahun anggaran 1999/2000 an. PT. Duta Sulawesi Agro dan Surat Pernyataan PT. Duta Sulawesi Agro tentang kesediaan menyelesaikan tunggakan dengan 3 kali angsuran yang ditandatangani oleh SUBUKI SOKONG, tanggal 23 Januari 2001; _____
- Bahwa selanjutnya terdakwa selaku Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Kendari melakukan tindakan penagihan pembayaran terhadap tunggakan PSDH dan DR dengan dasar Surat Perhitungan Tahunan/Pemungutan dan Penyetoran Tahunan Provisi Sumber Daya Hutan dan Dana Reboisasi (SPT-HPH/IPK) dan Surat Pernyataan PT. Duta Sulawesi Agro tanggal 23



Januari 2001 perihal pernyataan kesanggupan untuk membayar/melunasi Tunggakan PSDH dan DR sesuai SPT Tahun 1999/2000 beserta bunganya dengan tiga tahap angsuran, dengan Surat Nomor: 973/450/Dk-KDI/2000 tanggal 25 Januari 2001, perihal penagihan PSDH dan DR; _____

- Bahwa dari Surat yang dikirimkan oleh terdakwa sehubungan dengan tunggakan PSDH dan DR tidak ada penyelesaian selanjutnya terdakwa memberikan peringatan pertama, kedua dan ketiga melalui: _____
- Surat No: 973/556.A/DK.KDI/2001, tanggal 30 Maret 2001, perihal peringatan I; _____
- Surat Nomor: 973/233/DK.KDI/2001, tanggal 9 Oktober 2001, perihal peringatan II; _____
- Surat Nomor: 973/2924.A/Dk.KDI/XII/2001, tanggal 21 Desember 2001, perihal peringatan III; _____
- Bahwa setelah dilakukan penagihan, peringatan I, peringatan II dan peringatan III ternyata PT. Duta Sulawesi Agro belum juga melakukan penyelesaian tunggakan iuran PSDH dan DR sehingga terdakwa selaku Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Kendari menyerahkan penyelesaian tunggakan tersebut kepada Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara Kendari dengan surat Nomor: 973/580/DK-KDI/2002, perihal Penyerahan urusan Piutang Negara, tertanggal 28 Maret 2002, dengan perincian hutang dalam lampiran surat penyerahan pengurusan piutang Negara yaitu: _____

Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH): _____

- Pokok Hutang : Rp. 186.779.591,75; _____
- Bunga (%) : $46\% \times \text{Rp. } 186.779.591,75 = \text{Rp. } 85.918.612,20$; _____

Dana Reboisasi (DR): _____

- Pokok Hutang : Rp. 58.206.047,45 ; _____
: US \$ 78,552.82; _____
- Bunga (%) : $46\% \times \text{Rp. } 58.206.047,45 = \text{Rp. } 26.774.781,83$; _____
: $46\% \times \text{US } \$ 78,552.82 = \text{US } \$ 36.134,30$; _____

- Bahwa setelah dilakukan penelitian dan dinyatakan diterima oleh Panitia Urusan Piutang Negara maka diterbitkan Surat Penerimaan Pengurusan Piutang Negara (SP3N) Nomor: 20/PUNPC.25/2002 Tanggal 3 Juni 2002 dan selanjutnya pihak Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara (KP2LN) Kendari memanggil pihak PT. Duta Sulawesi Agro dan oleh



karena Pihak PT. Duta Sulawesi Agro tidak hadir maka dilakukan pemanggilan terakhir dengan surat Nomor: PT-21/WPL.08/KP.04/2002, tanggal 06 September 2002, perihal panggilan terakhir untuk mempertanggungjawabkan penyelesaian hutang; _____

- Bahwa PT. Duta Sulawesi Agro tidak memenuhi surat panggilan dari KP2LN, selanjutnya Panitia Urusan Piutang Negara Cabang Sulawesi Tenggara mengeluarkan Keputusan Panitia Urusan Piutang Negara Cabang Sulawesi Tenggara Nomor: PJPNC-45/PUPNC.25/2002 tentang Penetapan Jumlah Piutang Negara atas nama PT. Duta Sulawesi Agro yang memutuskan jumlah piutang Negara yang wajib dilunasi/diselesaikan oleh PT Duta Sulawesi Agro Kendari kepada Negara cq. Dinas Kehutanan Kab. Kendari adalah sebesar Rp. 1.024.226.096, 55 (satu milyar dua puluh empat juta dua ratus dua puluh enam ribu sembilan puluh enam rupiah 55/100) dengan perincian Hutang pokok sebesar Rp. 637.749.739,20., bunga sebesar Rp. 293.364.896,03 dan biaya administrasi pengurusan piutang Negara 10% sebesar Rp. 93.111.463,32; _____
- Bahwa pihak Dinas Kehutanan Kabupaten Kendari menyampaikan kepada Kepala Kantor Piutang Negara dan Lelang Negara Kendari tentang koreksi Piutang PT. Duta Sulawesi Agro berdasarkan Surat Nomor: 973/1813/DK-KDI/02, tanggal 7 Oktober 2002 dan atas koreksi tersebut, Kantor KP2LN menyampaikan bahwa atas koreksi hutang PT. Duta Sulawesi Agro harus dilampirkan bukti-bukti pembayaran yang tidak tercatat atau bukti-bukti kesalahan perhitungan melalui Surat Nomor: S-37/WPL.08/KP.04/2003 dan atas penyampaian tersebut, Dinas Kehutanan Kabupaten Kendari kembali melakukan koreksi piutang PT. Duta Sulawesi Agro kepada Kepala Kantor Urusan Pelayanan Piutang dan Lelang Negara (KP2LN) Kendari dengan surat Nomor: 973/1813/DK-KDI/2002, tertanggal 30 Oktober 2002 yang ditandatangani oleh Ir. Yusuf Supriatna WM selaku Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Kendari yang menyampaikan tagihan hutang PT. Duta Sulawesi Agro atas PDH dan DR sejumlah Rp. 931.114.633,23 dengan perincian PSDH (hutang pokok + bunga denda) Rp. 357.679.033,23., perincian DR (hutang pokok + bunga denda) Rp. 573.435.600,00 dan setelah dilakukan pemeriksaan berkas setoran, pihak PT. Duta Sulawesi Agro telah melakukan penyetoran sebesar Rp. 369.254.696. dengan perincian Penyetoran PSDH Rp. 120.300.051,00 dan



Penyetoran DR Rp. 248.954.696,00 sebagaimana bukti setor terlampir. Dengan demikian sisa tunggakan PT. Duta Sulawesi Agro atas PSDH dan DR sebesar Rp. 561.859.923,24 yang terdiri PSDH (hutang pokok + bunga denda) sebesar Rp. 152.398.152,96 dan DR (hutang pokok + bunga denda) sebesar Rp. 409.461.770,28; _____

- Bahwa atas koreksi dari Dinas Kehutanan Kabupaten Kendari, KP2LN melakukan verifikasi dan selanjutnya Panitia Urusan Piutang Negara Cabang Sulawesi Tenggara memberitahukan kepada PT. Duta Sulawesi Agro melalui Surat Nomor: SKPBN-01/PUPPNC.25/2003, tanggal 29 Januari 2001, hal Pemberitahuan Koreksi/ Perubahan Besaran Piutang Negara sebesar Rp. 618.045.930,95 termasuk biaya administrasi pengurusan piutang Negara 10%; _____
- Bahwa PT. Duta Sulawesi Agro belum melakukan pembayaran namun kemudian dari Dinas Kehutanan Kabupaten Kendari melakukan penarikan piutang dengan surat Nomor: 973/182/DK-Kdi.2003, tanggal 04 Februari 2003, perihal Penarikan Urusan Piutang PT. Duta Sulawesi Agro yang ditandatangani oleh Ir. Yusuf Supriatna. WM (terdakwa); _____
- Bahwa sehubungan dengan Surat Penarikan tersebut, selanjutnya Panitia Urusan Piutang Negara Cabang Sulawesi Tenggara menyampaikan persetujuan penarikan pengurusan piutang Negara dengan Surat Nomor: S-13/PUPNC.25/ 2003, tanggal 18 Maret 2003 yang ditujukan kepada Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Kendari dengan ketentuan Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara (Biad PPN) yang harus diselesaikan sebesar Rp. 2,5% x Rp. 561.859.923,24 = Rp. 14.046.491,00 ; _____
- Bahwa berdasarkan tanda Setoran Bank Rakyat Indonesia, PT. Duta Sulawesi Agro Kendari/Dinas Kehut. Unaaha telah menyetorkan jumlah uang sebesar Rp. 14.050.000,- ke Rek. Bend. Penerima KP2LN Kdi, No. Rek. 31.01.3437.8; _____
- Bahwa setelah pihak debitur melakukan penyelesaian pembayaran, selanjutnya Panitia Urusan Piutang Negara Cabang Sulawesi Tenggara menyampaikan kepada PT. Duta Sulawesi Agro Cabang Kendari, perihal Pernyataan Pengurusan Piutang Negara Selesai melalui Surat Nomor: SPPNS-12/PUPNC.25/2003 tanggal 18 Maret 2003 yang menyampaikan Pengurusan Piutang Negara atas nama PT. Duta Sulawesi Agro Cab.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kendari telah selesai, untuk selanjutnya pengurusan piutang Negara kembali dilakukan oleh Dinas Kehutanan Kabupaten Kendari; _____

- Bahwa sehubungan dengan penarikan tersebut, terdakwa Ir. Yusuf Supriatna. WM selaku Kepala Dinas Kehutanan Kab. Kendari menandatangani kwitansi tertanggal 16 Januari 2003 yang menyatakan sudah diterima dari PT. Duta Sulawesi Agro sejumlah uang sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) buat pembayaran pelunasan Tunggakan PSDH dan DR PT. Duta Sulawesi Agro; _____
- Bahwa terdakwa menerima 2 (dua) unit truck Toyota dyna dari PT. Hadji Kalla sehubungan dengan penarikan berkas Piutang PT. Duta Sulawesi Agro dari KP2LN; _____
- Bahwa yang menyodorkan kwitansi kepada terdakwa adalah NENENG ISKANDAR dan alasan terdakwa menandatangani karena adanya pemberitahuan bahwa kwitansi yang ia tandatangi sebagai urusan intern PT. Hadji Kalla dengan PT. Duta Sulawesi Agro; _____

____ _ Menimbang, bahwa berdasarkan fakta sebagaimana tersebut di atas yang menjadi sebab musabab terdakwa diajukan dipersidangan adalah sehubungan dengan **KWITANSI** tanpa nomor, yang menyebutkan sudah diterima dari **PT. Duta Sulawesi Agro**, jumlah uang **Rp. 250.000.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah)** buat pembayaran **Pelunasan Tunggakan PSDH dan DR PT. Duta Sulawesi Agro, Kendari, 16 Januari 2003, Yang Menerima Kepala Dinas Kehutanan Kab. Kendari**, cap/tanda tangan materai **Ir. Yusuf Supriatna, WM** dan atas KWITANSI tersebut kemudian Bupati Konawe melakukan penagihan kepada terdakwa untuk menyelesaikan Piutang Negara PT. Duta Sulawesi Agro melalui Surat Nomor: 542/696, tertanggal 20 April 2006 yang ditandatangani oleh PLT. Bupati, cap/tanda tangan Drs. Tony Herbiansyah, M.Si dan Surat Nomor: 522/481, tertanggal 4 Juni 2008, cap/tanda tangan DR. LUKMAN ABUNAWAS, SH., M.Si., yang mengharapkan terdakwa segera menyetor dana PSDH dan DR yang terdakwa telah terima ke rekening Menteri Kehutanan RI; _____

____ _ Menimbang, bahwa dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 51 Tahun 1998 tentang Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) pada Pasal 4 Ayat (1) menyebutkan bahwa PSDH Wajib disetor langsung ke Kas Negara dan untuk Dana Reboisasi (DR) sesuai dengan PP 35 Tahun 2002 Tentang Dana Reboisasi sebagaimana dimaksud



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 7 Ayat (1) menyebutkan bahwa wajib bayar menyetor dana reboisasi ke kas Negara; _____

____ Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa yang menandatangani kwitansi sebagai bukti pelunasan atas tunggakan PSDH dan DR sebesar Rp. 250.000.000,- dan perbuatan terdakwa yang tidak menyetor uang tersebut ke rekening Menteri Kehutanan sangat jelas bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat unsur **Melawan Hukum** telah terpenuhi; _____

Unsur : **Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi**; _____

____ Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, yaitu memperkaya diri sendiri, memperkaya orang lain atau memperkaya suatu korporasi sebagai sub unsur. Apabila salah satu dari sub unsur tersebut telah terpenuhi maka unsur ini telah terpenuhi; _____

____ Menimbang, bahwa secara harfiah, "memperkaya" artinya menjadikan bertambah kaya. Sedangkan "kaya" artinya mempunyai banyak harta (uang dan sebagainya) sehingga dapat disimpulkan bahwa memperkaya berarti menjadikan orang yang belum kaya menjadi kaya atau orang yang sudah kaya menjadi bertambah kaya; _____

____ Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, terdakwa telah menandatangani kwitansi yang disodorkan oleh NENENG ISKANDAR yang menyatakan telah diterima sejumlah uang sebesar Rp. 250.000.000,- yang diterima oleh Kepala Dinas Kab. Kendari Ir. Yusuf Supriatna; _____

____ Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Ir. TITI ANDIANI yang menyatakan saksi membenarkan kwitansi yang ditandatangani oleh terdakwa namun saksi tidak mengetahui secara pasti apakah ada uang yang diserahkan dalam kwitansi tersebut dan saksi pernah mendengar bahwa pelunasan tunggakan PSDH dan DR dalam bentuk kompensasi dua buah mobil truck Toyota Dyna dan saksi mengetahuinya setelah disampaikan oleh alm. SYAMSUL PAWEANGI secara lisan dan sepengetahuan saksi hutang PT. Duta Sulawesi Agro telah lunas berdasarkan kwitansi tersebut; _____



___ Menimbang, bahwa saksi NENENG ISKANDAR yang keterangannya dibacakan dipersidangan yang menyatakan bahwa ia tidak mengetahui apakah tunggakan PSDH dan DR dari PT. Duta Sulawesi Agro sudah lunas atau belum karena yang berurusan adalah pimpinan dari pihak Kehutanan Kabupaten Konawe dahulu Kabupaten Kendari sedangkan yang 2 unit mobil truck setahu saksi adalah kompensasi pembayaran tunggakan antara PT. Duta Sulawesi Agro dengan Pihak Dinas Kehutanan yang diserahkan kepada Kadis Kehutanan Kabupaten Konawe dalam hal ini terdakwa sejumlah Rp. 250.000.000,- ; _____

___ Menimbang, bahwa terdakwa dalam keterangannya menyatakan bahwa terdakwa menandatangani pada saat disodorkan oleh NENENG ISKANDAR dan dalam kwitansi tersebut hanya terdapat angka Rp. 250.000.000,- dan terdakwa menandatangani kwitansi karena adanya pemberitahuan bahwa kwitansi ini sebagai urusan intern Hadji Kalla dengan PT. Duta Sulawesi Agro dan tidak ada kaitannya dengan PSDH dan DR dan terdakwa tidak mendapat keuntungan; _____

___ Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Titi Andiani, saksi Neneng Iskandar dan keterangan terdakwa, majelis memperoleh petunjuk yaitu tanda bukti kwitansi yang ditandatangani oleh terdakwa merupakan kompensasi atas pemberian 2 buah Mobil Toyota Dyna dari PT. Hadji Kalla sebagai induk perusahaan PT. Duta Sulawesi Agro sehubungan dengan tunggakan PSDH dan DR an. PT. Duta Sulawesi Agro dan tanda bukti kwitansi tersebut terdakwa tidak memperoleh uang sebagaimana dalam kwitansi yaitu Rp. 250.000.000,- sehingga terdakwa tidak dapat menyetorkan ke nomor rekening Menteri Kehutanan RI; _____

___ Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Titi Andiani, saksi Neneng Iskandar dan keterangan terdakwa serta petunjuk, majelis berkeyakinan bahwa terdakwa tidak memperoleh uang sebesar Rp. 250.000.000,- sehingga Majelis berkesimpulan dengan menandatangani kwitansi Rp. 250.000.000,- tidaklah menambah kekayaan terdakwa bertambah sebesar Rp. 250.000.000,- ; _____

___ Menimbang, bahwa dalam persidangan, menurut majelis hakim, Penuntut Umum tidak dapat membuktikan berapa besarnya kekayaan terdakwa atau orang lain atau suatu korporasi sebelum terdakwa melakukan perbuatan dan berapa besarnya kekayaan terdakwa atau orang lain atau suatu korporasi setelah terdakwa melakukan perbuatan, sehingga tidak dapat dibuktikan seberapa besar tambahan kekayaan terdakwa atau orang lain atau suatu korporasi dan dengan pertimbangan tersebut,



maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "*melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi*" tidak terbukti; _____

____ _ Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur tindak pidana dalam dakwaan primair tidak terbukti, maka terdakwa tidak dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan primair, sehingga terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primair tersebut; _____

____ _ Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair yaitu Pasal 3 jo. Pasal 18 Ayat (1) huruf a, huruf b, Ayat (2) dan Ayat (3) UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang undang No. 31 Tahun 1999 jo. Pasal 55 Ayat (1) ke – 1 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut : _____

- Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi*; _____
- Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan*; _____
- Yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara*; _____

____ _ Menimbang, bahwa oleh karena unsur essensial dalam Pasal 3 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 adalah adanya penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan unsur ke-3 dalam Pasal 3 UUPTPK; _____

Unsur : *Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan*; _____

____ _ Menimbang, bahwa untuk terpenuhinya unsur ini. Terdakwa haruslah mempunyai suatu jabatan atau suatu kedudukan yang mana jabatan atau kedudukan tersebut telah disalahgunakan kewenangannya atau kesempatannya atau sarananya; _____

____ _ Menimbang, bahwa menyalahgunakan kesempatan, dan sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan menurut A HAMZAH (Korupsi di Indonesia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1984 hal 94) haruslah merujuk atau memenuhi kualitas sebagai pejabat atau mempunyai kedudukan dengan pengertian bahwa kualitas pejabat atau mempunyai kedudukan tersebut adalah dimaksudkan sebagai pejabat atau mereka yang mempunyai kedudukan sebagai pegawai negeri atau sebagai penyelenggara negara atau pegawai negeri yang mempunyai kedudukan atau jabatan dalam pemerintahan atau penyelenggara negara; _____

____ Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan bahwa terdakwa Ir. Yusuf Supriatna adalah seorang pegawai negeri sipil dengan jabatan Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Kendari sekarang Kabupaten Konawe berdasarkan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kendari, Nomor: 296 Tahun 2001 yang ditetapkan di Unaaha pada Tanggal 19 – 5 – 2001; _____

____ Menimbang, bahwa pada Tahun 2001, sejak terdakwa menjabat sebagai Pj. Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Kendari, terdakwa melakukan penagihan kepada PT. Duta Sulawesi Agro atas tunggakan iuran Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH dan DR) dan iuran Dana Reboisasi (DR) dengan berdasarkan Surat Perhitungan Tahunan/Pemungutan dan Penyetoran Tahunan Provisi Sumber Daya Hutan dan Dana Reboisasi (SPT-HPH/IPK) dan Surat Pernyataan PT. Duta Sulawesi Agro tanggal 23 Januari 2001 perihal pernyataan kesanggupan untuk membayar/ melunasi Tunggakan PSDH dan DR sesuai SPT Tahun 1999/2000 beserta bunganya dengan tiga tahap angsuran, dengan Surat Nomor: 973/450/Dk-KDI/2000 tanggal 25 Januari 2001, perihal penagihan PSDH dan DR; _____

____ Menimbang, bahwa dari Surat yang dikirimkan oleh terdakwa sehubungan dengan tunggakan PSDH dan DR PT. Duta Sulawesi Agro tidak ada penyelesaian selanjutnya terdakwa memberikan peringatan pertama, kedua dan ketiga melalui: ____

- Surat No: 973/556.A/DK.KDI/2001, tanggal 30 Maret 2001, perihal peringatan I; _____
- Surat Nomor: 973/233/DK.KDI/2001, tanggal 9 Oktober 2001, perihal peringatan II; _____
- Surat Nomor: 973/2924.A/Dk.KDI/XII/2001, tanggal 21 Desember 2001, perihal peringatan III _____

dan setelah memberikan peringatan I, II dan III tidak pula ditanggapi oleh PT. Duta Sulawesi Agro. Selanjutnya terdakwa menyerahkan ke Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara (KP2LN) untuk penyelesaian tunggakan PT. Duta Sulawesi Agro dengan surat Nomor: 973/580/DK-KDI/2002, perihal Penyerahan urusan Piutang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Negara, tertanggal 28 Maret 2002, dengan perincian hutang dalam lampiran surat penyerahan pengurusan piutang Negara yaitu: _____

- Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) : _____
- Pokok Hutang : Rp. 186.779.591,75; _____
- Bunga (%) : $46\% \times \text{Rp. } 186.779.591,75 = \text{Rp. } 85.918.612,20$; _____
- Dana Reboisasi (DR) : _____
- Pokok Hutang : Rp. 58.206.047,45 ; _____
: US \$ 78,552.82; _____
- Bunga (%) : $46\% \times \text{Rp. } 58.206.047,45 = \text{Rp. } 26.774.781,83$; _____
: $46\% \times \text{US } \$ 78,552.82 = \text{US } \$ 36.134,30$; _____

_____ Menimbang, bahwa atas penyerahan pengurusan penyelesaian piutang kepada KP2LN terdakwa melakukan 2 kali koreksi yaitu : _____

1. Koreksi Piutang PT. Duta Sulawesi Agro berdasarkan Surat Nomor: 973/1813/DK-KDI/02, tanggal 7 Oktober 2002 dan atas koreksi tersebut, Kantor KP2LN menyampaikan bahwa atas koreksi hutang PT. Duta Sulawesi Agro harus dilampirkan bukti-bukti pembayaran yang tidak tercatat atau bukti-bukti kesalahan perhitungan melalui Surat Nomor: S-37/WPL.08/KP.04/2003; _____
2. Koreksi kedua berdasarkan Surat Nomor: 973/1813/DK-KDI/2002, tertanggal 30 Oktober 2002 yang ditandatangani oleh Ir. Yusuf Supriatna WM selaku Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Kendari yang menyampaikan tagihan hutang PT. Duta Sulawesi Agro atas PDH dan DR sejumlah Rp. 931.114.633,23 dengan perincian PSDH (hutang pokok + bunga denda) Rp. 357.679.033,23., perincian DR (hutang pokok + bunga denda) Rp. 573.435.600,00 dan setelah dilakukan pemeriksaan berkas setoran, pihak PT. Duta Sulawesi Agro telah melakukan penyetoran sebesar Rp. 369.254.696. dengan perincian Penyetoran PSDH Rp. 120.300.051,00 dan Penyetoran DR Rp. 248.954.696,00 sebagaimana bukti setor terlampir. Dengan demikian sisa tunggakan PT. Duta Sulawesi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Agro atas PSDH dan DR sebesar Rp. 561.859.923,24 yang terdiri PSDH (hutang pokok + bunga denda) sebesar Rp. 152.398.152,96 dan DR (hutang pokok + bunga denda) sebesar Rp. 409.461.770,28; _____

____ Menimbang, bahwa atas koreksi dari Dinas Kehutanan Kabupaten Kendari, KP2LN melakukan verifikasi dan selanjutnya Panitia Urusan Piutang Negara Cabang Sulawesi Tenggara memberitahukan kepada PT. Duta Sulawesi Agro melalui Surat Nomor: SKPBN-01/PUPNC.25/2003, tanggal 29 Januari 2001, hal Pemberitahuan Koreksi/ Perubahan Besaran Piutang Negara sebesar Rp. 618.045.930,95 termasuk biaya administrasi pengurusan piutang Negara 10%; _____

____ Menimbang, bahwa PT. Duta Sulawesi Agro belum melakukan pembayaran namun kemudian dari Dinas Kehutanan Kabupaten Kendari (Konawe) melakukan penarikan piutang dengan surat Nomor: 973/182/DK-Kdi.2003, tanggal 04 Februari 2003, perihal Penarikan Urusan Piutang PT. Duta Sulawesi Agro yang ditandatangani oleh Ir. Yusuf Supriatna. WM (terdakwa) dengan alasan adanya itikad baik PT. Duta Sulawesi Agro untuk menyelesaikan hutangnya berupa PSDH dan DR secara bertahap langsung dibawah pengawasan Dinas Kehutanan Kabupaten Kendari; _____

____ Menimbang, bahwa sehubungan dengan Surat Penarikan tersebut, selanjutnya Panitia Urusan Piutang Negara Cabang Sulawesi Tenggara menyampaikan persetujuan penarikan pengurusan piutang Negara dengan Surat Nomor: S-13/PUPNC.25/ 2003, tanggal 18 Maret 2003 yang ditujukan kepada Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Kendari dengan ketentuan Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara (Biad PPN) yang harus diselesaikan sebesar Rp. 2,5% x Rp. 561.859.923,24 = Rp. 14.046.491,00 dan berdasarkan tanda Setoran Bank Rakyat Indonesia, PT. Duta Sulawesi Agro Kendari/Dinas Kehut. Unaha telah menyetorkan jumlah uang sebesar Rp. 14.050.000,- ke Rek. Bend. Penerima KP2LN Kdi, No. Rek. 31.01.3437.8 dan selanjutnya Panitia Urusan Piutang Negara Cabang Sulawesi Tenggara menyampaikan kepada PT. Duta Sulawesi Agro Cabang Kendari, perihal Pernyataan Pengurusan Piutang Negara Selesai melalui Surat Nomor: SPPNS-12/PUPNC.25/2003 tanggal 18 Maret 2003 yang menyampaikan Pengurusan Piutang Negara atas nama PT. Duta Sulawesi Agro Cab. Kendari telah selesai, untuk selanjutnya pengurusan piutang Negara kembali dilakukan oleh Dinas Kehutanan Kabupaten Kendari; _____



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

___ _ Menimbang, bahwa sehubungan dengan penarikan tersebut, terdakwa Ir. Yusuf Supriatna. WM selaku Kepala Dinas Kehutanan Kab. Kendari menandatangani kwitansi tertanggal 16 Januari 2003 yang menyatakan sudah diterima dari PT. Duta Sulawesi Agro sejumlah uang sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) buat pembayaran pelunasan Tunggakan PSDH dan DR PT. Duta Sulawesi Agro dan penandatanganan terdakwa lakukan sehubungan 2 (dua) unit truck Toyota dyna dari PT. Hadji Kalla yang terdakwa terima; _____

___ _ Menimbang, bahwa terdakwa sebagai Kepala Dinas Kehutanan mempunyai tugas dan tanggung jawab antara lain adalah melaksanakan urusan rumah tangga bupati dibidang kehutanan, melaksanakan pengawasan hutan dan kehutanan di wilayah Kabupaten Kendari (sekarang Kabupaten Konawe), melaksanakan penataan hutan, reboisasi dan juga pemanfaatan hutan; _____

___ _ Menimbang, bahwa dari tugas dan tanggung jawab salah satunya adalah melaksanakan pemanfaatan hutan salah satunya adalah melakukan penagihan terhadap iuran PSDH dan DR dari pemegang IPK, HPH atau hak lainnya sehubungan dengan pemamfaatan hasil hutan; _____

___ _ Menimbang, bahwa dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 51 Tahun 1998 tentang Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) pada Pasal 4 Ayat (1) menyebutkan bahwa PSDH wajib disetor langsung ke kas Negara dan untuk Dana Reboisasi (DR) sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 35 Tahun 2002 tentang Dana Reboisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Ayat (1) menyebutkan bahwa wajib bayar menyetor dana reboisasi ke kas Negara; _____

___ _ Menimbang, bahwa kwitansi yang ditandatangani oleh terdakwa yang oleh PT Duta Sulawesi Agro dianggap sebagai pelunasan tidak pernah disetorkan ke Negara melalui rekening Menteri Kehutanan dengan alasan bahwa penerimaan tersebut dilakukan dalam bentuk kompensasi kendaraan yang digunakan untuk operasional dinas kehutanan sehingga besaran nominal dalam kwitansi yaitu sebesar Rp. 250.000.000,- tidak dapat disetorkan ke kas Negara melalui rekening Menteri Kehutanan; _____

___ _ Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, terdakwa mengetahui secara pasti proses pembayaran iuran PSDH dan DR yaitu iuran PSDH dan DR dikatakan



telah dibayar apabila sipengusaha sudah mempunyai bukti transfer telah masuk ke rekening Menteri Kehutanan dan penyelesaian pembayaran tunggakan iuran PSDH dan DR PT. Duta Sulawesi Agro telah terdakwa serahkan ke pada KP2LN namun terdakwa menarik kembali karena adanya itikad baik PT. Duta Sulawesi Agro dalam menyelesaikan tunggakan PSDH dan DR sebagaimana dalam surat penarikan yang ditandatangani oleh terdakwa; _____

_____ Menimbang, bahwa alasan terdakwa yang menandatangani kwitansi yang disodorkan oleh NENENG ISKANDAR karena adanya pemberitahuan bahwa kwitansi yang ditandatangani oleh terdakwa sebagai urusan intern PT. Hadji Kalla dengan PT Duta Sulawesi Agro sehubungan dengan penyerahan 2 (dua) unit mobil Truck Toyota Dyna oleh PT Hadji Kalla yang dibawa oleh ISKANDAR KAMPAY sebagaimana dalam keterangannya dipersidangan; _____

_____ Menimbang, bahwa tugas dan jawab terdakwa selaku Kepala Dinas Kehutanan yang salah satunya adalah menata pemanfaatan hutan dikaitkan dengan perbuatan terdakwa yang menandatangani kwitansi mengenai pelunasan tunggakan PSDH dan DR PT. Duta Sulawesi Agro sedangkan terdakwa mengetahui bahwa dikatakan iuran PSDH dan DR telah dibayar apabila si pengusaha sudah mempunyai bukti transfer telah masuk ke rekening Menteri Kehutanan melainkan terdakwa menandatangani kwitansi yang menyatakan pelunasan tunggakan PSDH dan DR PT Duta Sulawesi Agro sebesar Rp. 250.000.000,- . Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat terdakwa telah menyalahgunakan kewenangan yang ada padanya karena jabatan sebagai kepala dinas. Oleh karena itu unsur **Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan** telah terpenuhi dengan sempurna; _____

Unsur : ***Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;*** _____

_____ Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, yaitu menguntungkan diri sendiri, menguntungkan orang lain atau menguntungkan suatu korporasi sebagai sub unsur. Apabila salah satu dari sub unsur tersebut telah terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terpenuhi; _____



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

___ _ Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menguntungkan” adalah suatu perbuatan yang dilakukan untuk memperoleh untung, sedangkan keuntungan sendiri bisa berupa yang bersifat non fisik, bisa juga berupa keuntungan berupa fisik baik dalam bentuk barang maupun finansial; _____

___ _ Menimbang, bahwa dipersidangan terungkap fakta hukum bahwa terdakwa Ir. Yusuf Supriatna, WM. Selaku Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Kendari yang menandatangani kwitansi tanpa nomor yang menyebutkan sudah diterima dari **PT. DUTA SULAWESI AGRO**, jumlah uang **Rp. 250.000.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah)** buat pembayaran **Pelunasan Tunggakan PSDH dan DR PT. Duta Sulawesi Agro, Kendari, 16 Januari 2003, Yang Menerima Kepala Dinas Kehutanan Kab. Kendari, cap/stempel materai Ir. Yusuf Supriatna, WM** sedangkan ia mengetahui bahwa pembayaran iuran PSDH dan DR sebagaimana di atur dalam Kepmen yang menyatakan wajib setor menyetorkan dana PSDH dan DR ke kas bendahara Kementerian Kehutanan melalui no rekening Menteri Kehutanan; _

___ _ Menimbang, bahwa dasar kwitansi tersebut Pihak PT. Duta Sulawesi Agro menganggap secara keseluruhan tunggakan PSDH dan DR dari PT Duta Sulawesi Agro telah selesai dan lunas sedangkan berdasarkan Surat Nomor: 973/1813/DK-KDI/2002 yang ditandatangani oleh terdakwa Ir. Yusuf Supriatna selaku Kepala Dinas, perihal koreksi piutang PT. Duta Sulawesi Agro yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara (KP2LN) Kendari terdapat sisa tunggakan atas PSDH dan DR sejumlah Rp. 561.859.923,24; _____

___ _ Menimbang, bahwa terdakwa tidak menerima uang sejumlah Rp. 250.000.000,- sebagaimana disebutkan dalam kwitansi tersebut, melainkan pembayaran tersebut dikonpensasikan dengan 2 unit mobil truck Toyota Dyna yang diberikan oleh PT. Hadji Kalla selaku induk perusahaan PT. Duta Sulawesi Agro kepada Dinas Kehutanan Kabupaten Kendari pada saat terdakwa menjabat sebagai kepala dinas; _____

___ _ Menimbang, bahwa pembayaran iuran PSDH dan DR oleh PT. Duta Sulawesi Agro dengan kompensasi dua buah mobil telah menguntungkan pihak PT. Duta Sulawesi Agro karena pembayaran iuran PSDH dan DR seharusnya dalam bentuk tunai yang disetorkan ke rekening Menteri Kehutanan dan terdakwa mengetahui hal tersebut; _____

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



___ _ Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa yang menandatangani kwitansi senilai Rp. 250.000.000,- sebagai pelunasan iuran PSDH dan DR PT. Duta Sulawesi Agro sedangkan terdakwa mengetahui tunggakan PT Duta Sulawesi Agro sesungguhnya atas PSDH dan DR sebesar Rp. 561.859.923,24 juga telah menguntungkan pihak PT. Duta Sulawesi Agro yang menganggap tunggakan iuran PSDH dan DR-nya telah lunas berdasarkan kwitansi yang ditandatangani oleh terdakwa selaku Kepala Dinas Kabupaten Kendari; _____

___ _ Menimbang, bahwa Dengan demikian unsur *dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi* telah terpenuhi dengan sempurna; _____

Unsur : *Yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara*; ___

___ _ Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara berdasarkan penjelasan umum undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 adalah seluruh keuangan negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau tidak dipisahkan termasuk didalamnya segala bagian keuangan negara dan segala hak dan kewajiban yang patut yang bertujuan memberikan mamfaat, kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat; _____

___ _ Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan perbuatan terdakwa yang menandatangani kwitansi tanpa nomor yang menyebutkan sudah diterima dari **PT. DUTA SULAWESI AGRO**, jumlah uang **Rp. 250.000.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah)** buat pembayaran **Pelunasan Tunggakan PSDH dan DR PT. Duta Sulawesi Agro, Kendari, 16 Januari 2003, Yang Menerima Kepala Dinas Kehutanan Kab. Kendari, cap/stempel materai Ir. Yusuf Supriatna, WM**, seolah-olah benar terdakwa menerima uang sebesar Rp. 250.000.000,- sebagai pembayaran pelunasan iuran PSDH dan DR; _____

___ _ Menimbang, bahwa atas dasar tanda bukti kwitansi tersebut selanjutnya Pj. Bupati Konawe Tony Herbiansyah, M.Si., melakukan penagihan kepada terdakwa melalui Surat Nomor: 900/937, tanggal 22 Mei 2006 yang pada pokoknya menyatakan agar menyetor dana yang yang terdakwa terima ke rekening Menteri Kehutanan; _____



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

___ _ Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Nomor: 522/481, tanggal 4 Juni 2008 perihal Tunggakan PSDH dan DR yang ditujukan kepada terdakwa Ir. Yusuf Supriatna WM yang pada pokoknya mengharapkan agar terdakwa segera menyetor dana PSDH dan DR yang terdakwa telah terima berdasarkan kwitansi tertanggal 16 Januari 2003 ke rekening menteri kehutanan; _____

___ _ Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Ir. Muhammad Nasir setelah melaksanakan surat perintah bupati sehubungan dengan penyelesaian tunggakan PSDH dan DR, saksi Ir. Muhammad Nasir bertemu dengan Nana Jamil di Makassar dan disampaikan kepadanya agar ia berkoordinasi dengan PT Hadji Kalla Cabang Kendari dan bertemu dengan Neneng Iskandar dan menyampaikan bahwa PT. Duta Sulawesi Agro telah melunasi tunggakan PSDH dan DR berdasarkan kwitansi tanggal 16 Januari 2003 sebesar Rp. 250.000.000,- yang diterima oleh terdakwa; _____

___ _ Menimbang, bahwa Ir. Titi Andiani dalam keterangannya menyebutkan bahwa ia pernah mendengar dari almarhum SYAMSUL PAWEANGI yang menyatakan bahwa pelunasan tunggakan PSDH dan DR dalam bentuk kompensasi 2 buah mobil truck Toyota Dyna; _____

___ _ Menimbang, bahwa dari keterangan AHLI mengatakan terhadap tunggakan PSDH dan DR PT. Duta Sulawesi Agro telah melakukan pembayaran sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) berdasarkan kwitansi tanggal 16 Januari 2003 yang diterima oleh terdakwa Ir. Yusuf Supriatna, WM selaku Kepala Dinas Kehutanan Kabupatten Kendari; _____

___ _ Menimbang, bahwa pembayaran sebesar Rp. 250.000.000 tidak disetorkan ke rekening Menteri Kehutanan, dan menurut ahli ada kerugian Negara walaupun pembayaran tersebut tidak termonitoring direkening Menteri Kehutanan; _____

___ _ Menimbang, bahwa dengan menandatangani kwitansi tanpa nomor yang menyebutkan sudah diterima dari **PT. DUTA SULAWESI AGRO**, jumlah uang **Rp. 250.000.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah)** buat pembayaran **Pelunasan Tunggakan PSDH dan DR PT. Duta Sulawesi Agro, Kendari, 16 Januari 2003, Yang Menerima Kepala Dinas Kehutanan Kab. Kendari, cap/stempel materai Ir. Yusuf Supriatna, WM** walaupun pada kenyataannya terdakwa tidak menerima dana sebesar Rp. 250.000.000,- melainkan dikompensasikan dengan 2 unit mobil truck Toyota Dyna yang diterima Dinas Kehutanan Kendari melalui terdakwa menurut Majelis Hakim dikategorikan perbuatan yang dapat merugikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Negara karena dalam kwitansi dibahasakan sebagai tanda bukti pelunasan iuran PSDH dan DR sedangkan pada kenyataannya PT. Duta Sulawesi Agro masih mempunyai tunggakan PSDH dan DR sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat kwitansi yang ditandatangani oleh terdakwa berpotensi dapat menimbulkan kerugian keuangan atau perekonomian negara; _____

____ Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dapatlah disimpulkan bahwa unsur: **Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara** dalam dakwaan subsidair Pasal 3 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi telah terpenuhi; _____

____ Menimbang, bahwa dengan terbuktinya seluruh unsur dalam dakwaan subsidair telah terpenuhi, maka pendapat Penasihat hukum terdakwa yang menyatakan dakwaan subsidair Jaksa Penuntut Umum tidak terbukti menurut majelis hakim dikesampingkan; _____

____ Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur tindak pidana dalam dakwaan subsidair terpenuhi, maka terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana isi ketentuan Pasal 3 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001; _____

____ Menimbang bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut secara hukum; _____

____ Menimbang, bahwa pertanggungjawaban pidana dapat dimintakan kepada pelaku tindak pidana apabila tidak diketemukan lagi hal-hal yang dapat menghapus kesalahan pelaku; _____

____ Menimbang, bahwa hal-hal yang dapat menghapus kesalahan pelaku tindak pidana termuat dalam titel III dari Buku I KUHP, akan tetapi rincian alasan penghapus pidana dalam titel III dari Buku I KUHP tidak berlaku secara limitative tetapi secara enunsiatif yang berarti bahwa kalau perlu ilmu pengetahuan hukum dapat menambah alasan-alasan penghapus kesalahan dengan berdasar atas hukum adat kebiasaan atau atas yurisprudensi atau putusan-putusan hakim; _____

____ Menimbang, bahwa Mahkamah Agung Republik Indonesia telah memutuskan sebagai suatu putusan penting yang menjadikan patokan untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterimanya kemungkinan adanya alasan-alasan menghapuskan sifat dapat dihukumnya suatu perbuatan diluar KUHP demi memenuhi tuntutan keadilan; _____

_____ Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Agung dalam kasus Machrys Effendi (MA No. 42 K/Kr/1965, tanggal 8 januari 1966) memutuskan sebagai berikut: _____

“Suatu tindakan pada umumnya dapat hilang sifatnya sebagai melawan hukum bukan hanya berdasarkan suatu ketentuan perundang-undangan melainkan juga berdasarkan asas-asas keadilan atau asas-asas hukum yang tidak tertulis dan bersifat umum, dalam perkara ini misalnya faktor Negara tidak dirugikan, kepentingan umum terlayani dan terdakwa tidak memperoleh keuntungan”; _____

_____ Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi tersebut, selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan, apakah perbuatan terdakwa dengan menandatangani kwitansi tanpa nomor yang menyebutkan sudah diterima dari PT. DUTA SULAWESI AGRO, jumlah uang Rp. 250.000.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) buat pembayaran Pelunasan Tunggakan PSDH dan DR PT. Duta Sulawesi Agro, Kendari, 16 Januari 2003, Yang Menerima Kepala Dinas Kehutanan Kab. Kendari, cap/stempel materai Ir. Yusuf Supriatna, WM, Negara tidak dirugikan, kepentingan umum terlayani dan terdakwa tidak memperoleh keuntungan; _____

_____ Menimbang, bahwa atas pertanyaan-pertanyaan tersebut, Majelis mempertimbangkan sebagai berikut: _____

- **Negara tidak dirugikan;** _____
- Bahwa Majelis Hakim telah mempertimbangkan unsur **Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara** dalam dakwaan subsidair Pasal 3 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi telah terpenuhi namun apakah perbuatan terdakwa yang menandatangani kwitansi tanpa nomor yang menyebutkan sudah diterima dari **PT. DUTA SULAWESI AGRO**, jumlah uang **Rp. 250.000.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah)** buat pembayaran **Pelunasan Tunggakan PSDH dan DR PT. Duta Sulawesi Agro, Kendari, 16 Januari 2003, Yang Menerima Kepala Dinas Kehutanan Kab. Kendari**, cap/stempel materai **Ir. Yusuf Supriatna, WM** benar-benar merugikan Negara secara riil; _____
- Bahwa iuran PSDH dan DR adalah Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan dikatakan sebagai uang negara apabila iuran PSDH dan DR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dimasukkan kedalam rekening Menteri Kehutanan dan dihitung sebagai PNBP; _____

- Bahwa terdakwa mengetahui adanya tunggakan PSDH dan DR atas nama PT. Duta Sulawesi Agro berdasarkan SPT. HPH/IPK Tahun 1999/2000 dan selanjutnya terdakwa melakukan penagihan awal tanggal 25 Januari 2001 sebagaimana dalam Surat Nomor 973/450/DK-KDI/2000 yang ditandatangani oleh terdakwa selaku Plt. Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Kendari; _____
- Bahwa setelah melakukan penagihan dan tidak ada tindak lanjut dari PT. Duta Sulawesi Agro selanjutnya terdakwa melakukan peringatan I, II dan III namun tidak ada juga tindak lanjut dari pihak PT. Duta Sulawesi Agro sehingga akhirnya terdakwa menyerahkan penyelesaian tunggakan PSDH dan DR an. PT. Duta Sulawesi Agro kepada Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara Kendari (KP2LN Kendari) sebagaimana dalam Surat Nomor: 973/580/DK-KDI/2002 tanggal 28 Maret 2002; _____
- Bahwa pihak KP2LN telah melakukan proses sebagaimana mestinya dan atas penetapan tunggakan iuran PSDH dan DR sebesar Rp. 1.024.226.096, 55 (satu milyar dua puluh empat juta dua ratus dua puluh enam ribu sembilan puluh enam rupiah 55/100) dengan perincian Hutang pokok sebesar Rp. 637.749.739,20., bunga sebesar Rp. 293.364.896,03 dan biaya administrasi pengurusan piutang Negara 10% sebesar Rp. 93.111.463,32 pihak PT. Duta Sulawesi Agro keberatan sehingga dilakukan perhitungan ulang dan berdasarkan tanda bukti transfer yang diajukan oleh PT. Duta Sulawesi Agro maka pihak Dinas Kehutanan Kabupaten Kendari melakukan koreksi piutang PT. Duta Sulawesi Agro kepada KP2LN Kendari dengan surat Nomor: 973/1813/DK-KDI/2002, tertanggal 30 Oktober 2002 yang ditandatangani oleh Ir. Yusuf Supriatna WM selaku Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Kendari yang menyampaikan tagihan hutang PT. Duta Sulawesi Agro atas PDH dan DR sejumlah Rp. 931.114.633,23 dengan perincian PSDH (hutang pokok + bunga denda) Rp. 357.679.033,23., perincian DR (hutang pokok + bunga denda) Rp. 573.435.600,00 dan setelah dilakukan pemeriksaan berkas setoran, pihak PT. Duta Sulawesi Agro telah melakukan penyetoran sebesar Rp. 369.254.696. dengan perincian Penyetoran PSDH Rp. 120.300.051,00 dan Penyetoran DR Rp. 248.954.696,00 sebagaimana bukti setor terlampir.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian sisa tunggakan PT. Duta Sulawesi Agro atas PSDH dan DR sebesar Rp. 561.859.923,24 yang terdiri PSDH (hutang pokok + bunga denda) sebesar Rp. 152.398.152,96 dan DR (hutang pokok + bunga denda) sebesar Rp. 409.461.770,28; _____

- Bahwa setelah ada pembicaraan antara pimpinan PT. Duta Sulawesi Agro dengan Bupati Kabupaten Kendari selanjutnya terdakwa melakukan penarikan piutang dengan Surat Nomor: 973/182/DK-KDI/2003, tanggal 04 Februari 2003 dan hal tersebut disetujui oleh PUPN setelah dilakukan pembayaran biaya administrasi sebesar Rp. 14.046.491,00 dan pengurusan piutang Negara kembali dilakukan oleh Dinas Kehutanan Kabupaten Kendari sekarang Kabupaten Konawe; _____
- Bahwa sehubungan dengan penarikan tersebut, terdakwa pada saat menjabat sebagai kepala dinas kehutanan menerima 2 unit truck Toyota Dyna dari PT Hadji Kalla Kendari yang merupakan induk perusahaan PT. Duta Sulawesi Agro yang kedua mobil truck tersebut terdaftar dalam inventaris barang Dinas Kehutanan dengan asal perolehan barang PAD Dinas Kehutanan dan diberikan Nomor Polisi DT 9021 A dan DT 9022 A; _____
- Bahwa sehubungan dengan penerimaan 2 unit mobil truck tersebut, kemudian terdakwa disodorkan kwitansi oleh Neneng Iskandar yang pada waktu itu sebagai salah satu karyawan PT. Hadji Kalla dan mengatakan kepada terdakwa bahwa kwitansi yang terdakwa tandatangani sebagai pertanggungjawaban intern PT. Hadji Kalla dengan PT. Duta Sulawesi Agro yang kemudian kwitansi tersebut mengakibatkan terdakwa terlibat dalam masalah ini; _____
- Bahwa terdakwa menandatangani kwitansi tersebut yang menyebutkan sudah diterima dari **PT. DUTA SULAWESI AGRO**, jumlah uang **Rp. 250.000.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah)** buat pembayaran **Pelunasan Tunggakan PSDH dan DR PT. Duta Sulawesi Agro, Kendari, 16 Januari 2003, Yang Menerima Kepala Dinas Kehutanan Kab. Kendari, cap/stempel materai Ir. Yusuf Supriatna, WM** namun pada kenyataannya terdakwa tidak menerima uang sebagaimana dalam kwitansi tersebut; _____
- Bahwa dari kwitansi tersebut dinyatakan seolah-olah Tunggakan PSDH dan DR an. PT. Duta Sulawesi Agro telah lunas sedangkan sebagaimana



koreksi terakhir Dinas Kehutanan Kabupaten Kendari atas Tunggakan PSDH dan DR PT. Duta Sulawesi Agro sebesar Rp. 561.859.923,24 sebagaimana dalam Surat Nomor: 973/1813/DK-KDI/2002, tanggal 30 Oktober 2002, perihal: koreksi piutang PT. Duta Sulawesi Agro yang ditandatangani oleh terdakwa; _____

- Bahwa apabila pembayaran sebagaimana dalam kwitansi yang terdakwa ditandatangani dianggap sebagai pembayaran PSDH dan DR maka pihak PT. Duta Sulawesi Agro baru membayar tunggakan PSDH dan DR kepada Negara sebesar Rp. 250.000.000,- sedangkan besaran tunggakan PSDH dan DR PT. Duta Sulawesi Agro sebesar Rp. Rp. 561.859.923,24 sehingga masih ada sisa tunggakan PSDH dan DR sebesar Rp. 561.859.923,24 – Rp. 250.000.000,- = Rp. 311.859.923,24;
- Bahwa dasar ahli mengatakan ada kerugian Negara akibat dari pembayaran yang diterima oleh terdakwa karena adanya kwitansi pembayaran tetapi pembayaran tidak termonitor di rekening Menteri Kehutanan; _____
- Bahwa pada dasarnya PT. Duta Sulawesi Agro telah melakukan pembayaran PSDH dan DR sebagaimana dalam kwitansi tanggal 16 Januari 2003 namun dalam fakta persidangan terungkap fakta hukum bahwa terdakwa tidak menerima uang sebagaimana dalam kwitansi tersebut melainkan nilai tersebut diperoleh dari kompensasi 2 unit truck Dyna yang diberikan oleh PT. Hadji Kalla kepada Dinas Kehutanan Kabupaten Kendari sebagai pembayaran tunggakan PSDH dan DR; _____
- Bahwa Dinas Kehutanan Kabupaten Kendari telah mendapatkan berupa 2 unit mobil truck Toyota Dyna sehingga menurut Majelis Hakim walaupun Negara dapat dirugikan sebesar Rp. 250.000.000,- namun disisi lain Pemda Kabupaten Kendari Khususnya Dinas Kehutanan Kabupaten Kendari sekarang Kabupaten Konawe mendapat keuntungan sehingga majelis berpendapat Negara tidak dirugikan secara nyata; _____
- **Kepentingan umum terlayani;** _____
- Bahwa atas kompensasi kedua mobil tersebut pihak Dinas Kehutanan Kabupaten Konawe dahulu Kabupaten Kendari memasukkannya kedalam daftar inventaris barang Priode Januari s/d 31 Desember 2004 sampai dengan daftar inventaris barang Priode Januari s/d 31 Desember 2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara perolehan barang PAD Dishut Kabupaten Konawe dahulu Kabupaten Kendari; _____

- Bahwa atas kompensasi 2 mobil truk Toyota Dyna diberi nomor polisi DT 9021 A dan DT 9022 A; _____
- Bahwa dengan kompensasi 2 unit mobil truck Toyota Dyna mobilisasi Dinas Kehutanan Kabupaten Konawe dahulu Kabupaten Kendari dalam pemberantasan illegal logging semakin mudah dan terjangkau dengan menggunakan mobil tersebut; _____
- Bahwa sejak 2 mobil kompensasi telah diterima oleh Dinas Kehutanan Kabupaten Konawe dahulu Kabupaten Kendari sampai dengan Tahun 2008 kedua unit mobil tersebut masih masuk dalam inventaris barang Dinas Kehutanan Kabupaten Konawe maka selama kurun waktu tersebut ke dua mobil tersebut digunakan untuk kepentingan Dinas Kabupaten Konawe dahulu Kabupaten Kendari. Oleh karena itu Majelis berpendapat bahwa selama kurun waktu tersebut kepentingan umum terlayani; _____
- **Terdakwa tidak memperoleh keuntungan;** _____
- Bahwa dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan terdakwa telah menandatangani kwitansi tanpa nomor yang menyebutkan sudah diterima dari **PT. DUTA SULAWESI AGRO**, jumlah uang **Rp. 250.000.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah)** buat pembayaran **Pelunasan Tunggakan PSDH dan DR PT. Duta Sulawesi Agro, Kendari, 16 Januari 2003, Yang Menerima Kepala Dinas Kehutanan Kab. Kendari, cap/stempel materai Ir. Yusuf Supriatna, WM;** _____
- Bahwa dari saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum, tidak ada yang dapat memastikan bahwa terdakwa menandatangani kwitansi pelunasan PSDH dan DR terdakwa memperoleh uang sebesar Rp. 250.000.000,- sebagaimana dalam kwitansi melainkan terdakwa menandatangani sehubungan dengan kompensasi 2 unit mobil truk Toyota Dyna dari PT. Hadji Kalla kepada Dinas Kehutanan Kabupaten Kendari sekarang Kabupaten Konawe sehubungan dengan tunggakan PSDH dan DR PT. Duta Sulawesi Agro; _____

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terdakwa yang pada awalnya yang menyerahkan penyelesaian pengurusan piutang ke KP2LN Kendari atas tunggakan PSDH dan DR an. PT Duta Sulawesi Agro dan walaupun pada akhirnya terdakwa pula yang menarik kembali penyelesaian tersebut mau menerima pembayaran PSDH dan DR sedangkan terdakwa mengetahui kalau pembayaran PSDH dan DR harus disetorkan langsung ke nomor rekening Menteri Kehutanan dan alasan terdakwa menandatangani kwitansi tersebut sehubungan dengan kompensasi 2 unit mobil truk Toyota Dyna yang diterima oleh Dinas Kehutanan Kabupaten Kendari melalui terdakwa; _____
- Bahwa dari pertimbangan tersebut, majelis berkesimpulan bahwa terdakwa yang menandatangani kwitansi tersebut sama sekali tidak memperoleh keuntungan; _____

____ Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas ternyata terdakwa benar-benar tidak memperoleh keuntungan sedikit pun dengan menandatangani kwitansi pelunasan dan Negara tidak dirugikan secara nyata dan kepentingan umum terlaksana, majelis berpendapat bahwa tidaklah pantas terdakwa dijatuhi pidana walaupun perbuatan terdakwa melawan hukum formil dan penjatuhan pidana terhadap diri terdakwa dapat mencederai rasa keadilan pada diri terdakwa dan dapat pula melukai rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat; _____

____ Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung sebagaimana tersebut diatas, perbuatan terdakwa yang menandatangani kwitansi tanpa nomor yang menyebutkan sudah diterima dari PT. DUTA SULAWESI AGRO, jumlah uang Rp. 250.000.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) buat pembayaran Pelunasan Tunggakan PSDH dan DR PT. Duta Sulawesi Agro, Kendari, 16 Januari 2003, Yang Menerima Kepala Dinas Kehutanan Kab. Kendari, cap/stempel materai Ir. Yusuf Supriatna, WM, telah nyata terdakwa tidak diuntungkan, Negara tidak dirugikan secara nyata dan kepentingan umum terlaksana maka sifat melawan hukumnya perbuatan terdakwa hilang sehingga terdakwa tidak dapat dihukum dengan kata lain perbuatan terdakwa yang melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan ke dua Jaksa Penuntut Umum telah terbukti namun terdapat alasan pemaaf yang menghapuskan kesalahan terdakwa dan dengan sendirinya pertanggungjawaban pidana tidak dapat diterapkan kepada terdakwa atau dengan kata lain perbuatan tersebut bukanlah tindak pidana, sehingga konsekuensi hukumnya terdakwa harus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilepaskan dari segala tuntutan hukum, dalam hal ini majelis sependapat dengan Penuntut Umum tentang terbuktinya perbuatan terdakwa, akan tetapi tidak sependapat tentang terdakwa harus dijatuhi hukuman; _____

____ _ Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan lepas dari segala tuntutan hukum, maka kepadanya harus diberikan rehabilitasi yaitu untuk mendapatkan pemulihan akan hak-haknya dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya seperti semula; _____

____ _ Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa selama pemeriksaan dipersidangan dilakukan penahanan dan terdakwa dinyatakan lepas dari segala tuntutan hukum maka majelis memerintahkan terdakwa dikeluarkan dari tahanan; _____

____ _ Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti, dengan mengacu kepada ketentuan yang berlaku untuk itu, akan ditentukan dalam amar putusan ini; _____

____ _ Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dilepaskan dari segala dakwaan, maka biaya yang timbul dari perkara ini harus dibebankan kepada negara; _____

____ _ Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 191 Ayat (2) Jo Pasal 97 Ayat (1 dan 2) KUHAP dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan ;

_____ M E N G A D I L I _____

- Menyatakan terdakwa **Ir. Yusuf Supriatna. WM**, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair; _____
- Membebaskan terdakwa Ir. Yusuf Supriatna WM dari dakwaan primair tersebut; _____
- Menyatakan terdakwa tersebut diatas, telah terbukti melakukan perbuatan *“Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara”*, **akan tetapi perbuatan tersebut bukanlah suatu tindak pidana**; _____



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum; _____
- Memulihkan hak-hak terdakwa Ir. Yusuf Supriatna, WM., dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya seperti keadaan semula; _____
- Memerintahkan terdakwa dikeluarkan dari tahanan; _____
- Menetapkan barang bukti berupa : _____
 1. Surat Gubernur Sultra Nomor: 912/5723 Perihal Pertanggungjawaban Pengurusan piutang Negara atas tunggaan PSDH dan DR tanggal 31 Desember 2004 kepada Bupati Konawe; _____
 2. Surat Kepala Dinas Kehutanan Kab. Konawe No: 973/378 tahun 2005 tanggal 17 Februari 2005 Perihal Tunggaan PSDH dan DR PT. Duta Sulawesi Agro; _____
 3. Surat Kepala Dinas Kehutanan Kab. Konawe, No. 973/857/005 tanggal 4 April 2005 Perihal Pertanggungjawaban Pengurusan Piutang Negara atas Tunggaan PSDH dan DR PT. Duta Sulawesi Agro; _____
 4. Surat Bupati Konawe No. 542/696 tanggal 20 April 2006 Perihal Konfirmasi Pos Audit; _____
 5. Surat Bupati Konawe 900/973 tanggal 22 Mei 2006 Perihal Setoran PSDH dan DR PT. Duta Sulawesi Agro; _____
 6. Surat Bupati Konawe 522/481 tanggal 4 juni 2008 Perihal Tunggaan PSDH dan DR; _____

Dikembalikan kepada Dinas Kehutanan Propinsi Sulawesi Tenggara melalui Ir. H. ABD. RAIS. B., M.Si. selaku Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Sulawesi Tenggara; _____

 7. Foto copy Surat Keputusan Bupati Kendari Nomor: 296 Tahun 2001 tanggal 19 Mei 2001 beserta lampirannya tentang pengangkatan sebagai Pj. Kepala Dinas Kehutanan Kab. Kendari; _____
 8. 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi Pelunasan Tunggaan PSDH dan DR PT. Duta Sulawesi Agro tanggal 16 Januari 2003 sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah); _____

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi Biaya Administrasi pada Kantor Piutang dan Lelang Negara Cabang Kendari untuk penyelesaian Piutang PT. Duta Sulawesi Agro tanggal 29 Januari 2003 sebesar Rp. 44.500.000,- (empat puluh empat juta lima ratus ribu rupiah); _____
10. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Kendari kepada Pimpinan PT. Duta Sulawesi agro, No: 973/556.A/Dk.KDI/2001 tanggal 30 Maret 2001 Perihal Peringatan I; _____
11. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Kendari kepada Pimpinan PT. Duta Sulawesi agro, No: 973/223/Dk.KDI/2001 tanggal 9 Oktober 2001 Perihal Peringatan II; _____
12. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Kendari kepada Pimpinan PT. Duta Sulawesi agro, No: 973/2924/Dk.KDI/2001 tanggal 31 Desember 2001 Perihal Peringatan III; _____
13. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Dinas Kehutanan Kabupaten Kendari yang ditujukan kepada Kepala Badan Urusan Piutang Lelang Negara Kendari, No: 973/520/DK.KDI/ KDI/2002 Tanggal 28 Maret 2002 perihal Penyerahan Urusan Piutang Negara; _____
14. 3 (tiga) lembar fotocopy Surat Dinas Kehutanan Kab. Kendari yang ditujukan Kepala Badan Urusan Piutang Lelang Negara Kendari No: 973/580/KDI/2002 tanggal 28 Maret 2002 Perihal Lampiran Surat Penyerahan Pengurusan Piutang Negara; _____
15. 1 (satu) eksemplar fotocopy Keputusan Menteri Kehutanan RI. No. 613/KPTS-IV/1992 tanggal 15 Juni 1992 Tentang Tata Cara Pengenaan, Pemungutan, Penyetoran, Penyimpanan dan Penggunaan dana reboisasi; _____
16. 1 (satu) eksemplar fotocopy Keputusan Menteri Kehutanan RI. No. 614/KPTS-IV/1992 tanggal 15 Juni 1992 Tentang Tata Cara Pengenaan, Pemungutan, Penyetoran dan Pembayaran Iuran Hasil Hutan; _____



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi Pelunasan Tunggal PSDH dan DR PT. Duta Sulawesi Agrosebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) tanggal 16 Januari 2003; _____
18. Fotocopy Surat No. SE.04/VI-BIKPH/2005 tanggal 30 Maret 2005 Perihal Tunggal PSDH; _____
19. Fotocopy Surat Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Sulawesi Tenggara kepada Kepala Dinas Kehutanan Kab. Konawe tanggal Nomor:361/231/KDST tanggal 24 April 2008 Perihal Tunggal PSDH dan DR; _____
20. 1 (satu) lembar fotocopy faktur pembelian Mobil Toyota dari PT. Toyota Astra Motor tanggal 30 Nopember 2001; _____
21. 1 (satu) lembar fotocopy faktur pembelian Mobil Toyota dari PT. Toyota Astra Motor tanggal 25 Maret 2003; _____
22. 1 (satu) lembar fotocopy STNK DT 9021 A mobil truck Toyota Dyna; _____
23. 1 (satu) lembar fotocopy STNK DT 9022 A Mobil truck Toyota Dyna; _____
24. Fotocopy Laporan Tahunan barang inventaris Periode Januari Tahun 2008 sampai dengan 31 Desember 2008; _____
25. Fotocopy Laporan Tahunan barang inventaris Periode Januari Tahun 2007 sampai dengan 31 Desember 2007; _____
26. Fotocopy Laporan Tahunan barang inventaris Periode Januari Tahun 2006 sampai dengan 31 Desember 2006; _____
27. Fotocopy Laporan Tahunan barang inventaris Periode Januari Tahun 2005 sampai dengan 31 Desember 2005; _____
28. Fotocopy Laporan Tahunan barang inventaris Periode Januari Tahun 2004 sampai dengan 31 Desember 2004; _____
- Tetap Terlampir dalam berkas perkara; _____**
29. 1 (satu) Bundel berkas Piutang PT. Duta Sulawesi Agro **Dikembalikan kepada KP2LN melalui Pantjananto TEHP selaku Kepala Kantor KP2LN Cabang Kendari; _____**

- Membebankan biaya perkara kepada negara; _____

____ _ Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaha pada hari **Jum'at**, Tanggal **24 Juni 2011**, oleh kami: **ANDI ADHA, S.H.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Ketua Majelis, **ELLY SARTIKA ACHMAD, S.H.** dan **FITRI AGUSTINA, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **28 Juni 2011** oleh Hakim Ketua Majelis, didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **NURMIATI, SH.**, sebagai Panitera Pengadilan Negeri Unaaha, dihadiri oleh **AGUS SUTJIPTO, S.H.**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Unaaha, dan dihadapan terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya. _____

Hakim anggota

Hakim Ketua Majelis

1)

TTD

ELLY SARTIKA ACHMAD, SH.

TTD

ANDI ADHA, SH..

2)

TTD

FITRI AGUSTINA, SH.

Panitera Pengganti

TTD

NURMIATY, SH.